



---

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**

---

## **LAKIP 2022**

2022

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
KOMPLEKS PERKANTORAN BUMI PRAJA LAWORO

# Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Kita panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang dilaporkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 merupakan laporan tahun Kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017–2022 yang berisi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Muna Barat beserta upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target serta menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada tahun 2022.

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat juga disampaikan melalui *website: munabarat.go.id* sebagai upaya transparansi kinerja kepada masyarakat serta dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-SAKIP Reviu. (*esr.menpan.go.id*)

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laworo, Maret 2023

Pj. Bupati Muna Barat



Dr. BAHRI, S.STP.,M.Si.

## IKTISAR KINERJA

Pada dasarnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai misi, sasaran dan tujuan organisasi yang ditetapkan dalam suatu perencanaan lima tahunan dan atau satu tahunan dan akan dipertanggungjawabkan secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini, memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kabupaten Muna Barat Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022, Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muna Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dan dari segi birokrasi, kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang diukur melalui pencapaian 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama, pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Hal ini tentu merupakan kerja keras semua elemen aparat Pemerintah bersama masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang berkualitas demi mewujudkan Kabupaten Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius.

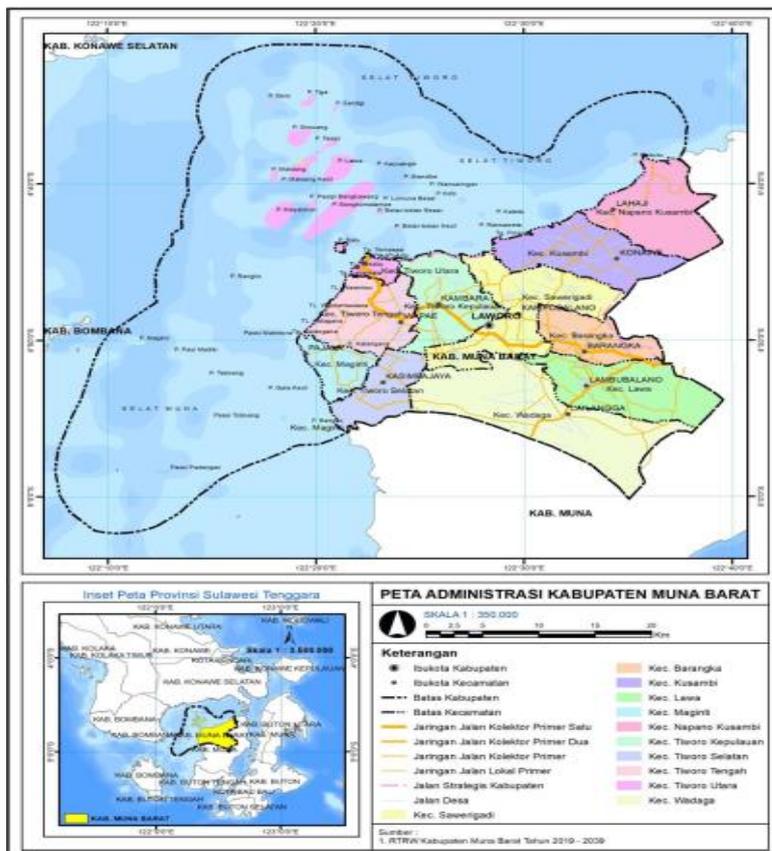
## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
IKTISAR KINERJA .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT .....	1
1.2. PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN MUNA BARAT .....	3
1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MUNA BARAT.....	4
1.4. SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT .....	4
1.5. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT.....	6
1.6. SISTEMATIKA LAPORAN .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
2.1 RPJMD KABUPATEN MUNA BARAT (2017-2022) .....	8
2.2 PERJANJIAN KINERJA 2022 .....	14
2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021 .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>18</b>
3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) TAHUN 2022 ...	18
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA INDIKATOR UTAMA TAHUN 2022.....	22
3.3. REALISASI BELANJA TAHUN 2022 .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

Kabupaten Muna Barat merupakan daerah otonom baru yang terbentuk pada tanggal 23 Juli tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 hasil dari pemekaran Kabupaten Muna yang



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Muna Barat

terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu Kota Kabupaten Muna Barat berkedudukan di Laworo Kecamatan Sawerigadi merupakan daerah kepulauan yang berada di bawah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

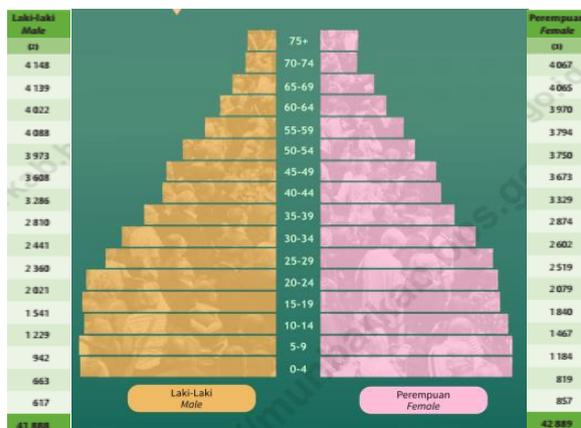
Kabupaten Muna Barat terletak di Pulau Muna bagian Barat yang memiliki gugusan pulau-pulau kecil, tersebar pada 36 pulau kecil yang terdiri

dari 14 pulau berpenghuni tetap, 5 pulau berpenghuni tidak tetap dan 17 pulau tidak berpenghuni. Luas wilayah daratan Kabupaten Muna Barat sebesar 906,28 Km<sup>2</sup> atau 90.628 ha. Secara administratif Kabupaten Muna Barat terdiri dari 11 Kecamatan meliputi Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kecamatan Lawa, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Maginti, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara, Kecamatan

Tiworo Kepulauan, Kecamatan Kusambi dan Kecamatan Napanokusambi dan 81 Desa dan 5 Kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Muna Barat berada pada 122°07'26" – 122°39'34"BT dan 04°31'04"-05°02'17"LS. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2014 Secara geografis, Kabupaten Muna Barat berbatasan dengan:

- Bagian Utara berbatasan dengan Selat Tiworo
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Napabalano, Kecamatan Lasalepa, Kecamatan Kontunga, Kecamatan Watopute, Kecamatan Kontunaga dan Kecamatan Lohia (Desa Liangkobori) Kabupaten Muna.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Komba-Komba, Desa Oensuli, Desa Kabangka Kecamatan Kabangka, Desa Kilambibito, Desa Lemo, Desa ahtara Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Tiworo



Gambar 1.2 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Muna Barat  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna Barat Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Muna Barat menurut BPS (Muna Barat Dalam Angka Tahun 2022) sebanyak 84.777 jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2022 (*Annual Population Growth Rate %*) 0,22 % kepadatan penduduk 93,5/km<sup>2</sup>. Adapun penduduk laki-laki berjumlah 41.888 jiwa (49,41%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 42.889

jiwa (50,59%). Kabupaten Muna Barat memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda atau produktif.

*Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif*

yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Muna Barat pada tahun 2022 adalah 53,34%. Besaran angka rasio ketergantungan di Kabupaten Muna Barat memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2018 hingga 2021, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 53,34%. dengan penurunan rata-rata -0,01% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kabupaten Muna Barat semakin berkurang setiap tahunnya. (data masih diolah)

## 1.2 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MUNA BARAT

Kualitas pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan bagaimana indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun



Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna Barat 2017 - 2022

kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan Semakin tinggi nilai

IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Nilai IPM Kabupaten Muna Barat tahun 2022 dengan nilai IPM 66,21 dan tahun 2021 dengan nilai IPM 65,48 merupakan ketegori **Sedang**

### **1.3 PERTUMBUHAN EKONOMIAN KABUPATEN MUNA BARAT**

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Muna Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan, namu dikarenakan efek pandemic di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun secara tajam, tapi pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 4,08% dari tahun 2021 sebesar 4,09%

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Konstruksi merupakan dua sektor dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan sektor lainnya dalam perekonomian Kabupaten Muna Barat selama tahun 2017-2022. Pada tahun 2022, nilai PDRB sektor sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah yang terbesar, yaitu mencapai 776,52\*\* miliar rupiah atau sebesar 6,50% dari total PDRB Kabupaten Muna Barat. Di posisi kedua, sektor Perdagangan dan eceran besar 5,77 % atau 203,75 milar rupiah di tahun 2022. dari total PDRB.

### **1.4 SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**

Susunan pemerintahan Kabupaten Muna Barat adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Dinas, Badan, Kantor, serta Sekretariat Kecamatan, dan Desa. Pemerintahan daerah juga berkoordinasi pula dengan kantor kementrian di daerah, Lembaga negara setingkat kementrian di daerah, lembaga pemerintahan non kementrian di daerah.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat Pada tahun 2017 merupakan tahun pertama terjadi pemilihan Kepala Daerah defenitif sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2017-2022. Pada tahun 2021 sampai tahun 2022 Kabupaten Muna Barat hanya di pimpin oleh seorang Bupati tanpa wakil

sampai berakhirnya masa periode. Pada tahun 2022 sampai dengan sekarang Kabupaten Muna Barat di Pimpin Oleh Penjabat Bupati Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta jajaran di bawahnya

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 8);, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Muna Barat terdiri dari ..... OPD/Unit Kerja yakni :

1. Sekretariat Daerah ( 9 Bagian)
2. Sekretariat Dewan
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas (18 OPD)
5. Badan (5 OPD)
6. RSUD
7. Kecamatan (11 Kecamatan)

Pemerintah Kabupaten Muna Barat memiliki sumber daya manusia yang belum berkecukupan dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah aparatur sipil negara per 1 Desember 2022 mencapai 1.945 orang, yang terdiri dari 984 laki-laki (51,22%) dan 961 perempuan (48,78%). Apabila dilihat :

- a. Berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Muna Barat didominasi oleh jenjang Pendidikan Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D (115 orang), Diploma III/Akta III/Sarjana Muda (1322 orang) Diploma I, II/Akta I, II (322 orang) diikuti SMA/Sederajat (177 orang), dan sisanya sebanyak 9 orang mengenyam Pendidikan SD, SMP

- b. Berdasarkan Jabatan jumlah sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tingkat JFT Pratama / Eselon II (30 Orang), Administrator / Eselon III (136 Orang) Pengawas/ Eselon IV (149 Orang) JF Guru (654 Orang) JF Medis (102 Orang) JF Teknis (54 Orang) sisanya JFU/Pelaksana (852 Orang)

### **1.5 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang

Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Muna Barat, diantaranya adalah:

1. Peningkatan Infrastruktur Wilayah
2. Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Ruang
3. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
4. Peningkatan kualitas Pendidikan
5. Peningkatan layanan kesehatan
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Penurunan Angka kemiskinan
8. Peningkatan Daya saing produk unggulan.
9. Peningkatan pengolahan sumberdaya alam (lahan potensial)
10. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
11. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

## **1.6 SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Pemerintah Kabupaten Muna Barat

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan renja tahun 2022 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

### **Lampiran**

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. RPJMD KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017-2022**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 - 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat 2017-2022.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat 2017-2022, disebutkan Visi Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 adalah:

**”TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA,  
DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN  
DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS”**

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan yang telah memiliki aspek mendasar mengandung beberapa pokok yakni SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF, BERDAYA SAING, DAN RELIGIUS. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal di masa depan

#### **1. MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA**

merefleksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah Muna Barat yang berkeadilan ditopang oleh pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada agropolitan dan minapolitan.

#### **2. MASYARAKAT MUNA BARAT YANG DEMOKRATIS,**

dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terefleksikan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, tata kelola keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), dan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, bernegara yang harmonis dan toleran.

#### **3. MASYARAKAT MUNA BARAT YANG PRODUKTIF,**

merefleksikan pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asia.

**4. MASYARAKAT MUNA BARAT YANG BERDAYA SAING,**

merefleksikan keberadaan infrastruktur Wilayah yang memadai dan berkualitas dalam mendukung Penataan dan daya saing pengembangan Wilayah khususnya pada pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pembangunan Desa, dan Pulau-Pulau Kecil; BERDAYA SAING juga merefleksikan pengelolaan Pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta Pelestarian/ pengembangan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal

**5. MASYARAKAT MUNA BARAT YANG RELIGIUS,**

merefleksikan masyarakat Kabupaten Muna Barat memiliki jati diri sebagai insan yang Berbudi Pekerti Luhur, dan berakhlak mulia dalam menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama yang harmonis dan toleran.

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan
4. Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama, pendukung dan manajemen. Namun, sebelum menyusun proses bisnis, terlebih dahulu diidentifikasi terlebih dahulu keterkaitan visi dan misi yang digambarkan dalam bagan berikut ini.

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS**



Gambar 2.1 Visi Misi Kabupaten Muna Barat 2017 - 2022

Berdasarkan bagan tersebut, maka kata kunci Visi Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 diterjemahkan ke dalam 4 (empat) hal yakni **SEJAHTERA**, (Misi 3) artinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi kerakyatan **DEMOKRATIS**, (Misi 5) dimaksudkan transparan, bermartabat, Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan kualitas pelayanan public yang Prima, **PRODUKTIF**, (Misi 1) artinya pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur **BERDAYA SAING**, (Misi 2 dan 4) artinya infrastruktur Wilayah yang berkualitas, pengelolaan Pariwisata, lingkungan hidup Keragaman Budaya dengan Kearifan Lokal adapun **RELIGIUS** menjadi pendukung tercapainya 5 (lima) kata kunci Misi dalam mewujudkan Visi

Bagan rekontruksi pencapaian visi menjadi bahan penyusunan proses bisnis RPJMD yang disajikan sebagai berikut ;



## Gambar 2.2 Proses Bisnis Kabupaten Muna Barat

Proses utama dalam mencapai Visi RPJMD adalah Peningkatan Kualitas SDM, Penguatan Ekonomi dan Daya Saing serta Peningkatan Kesejahteraan. Sedangkan proses pendukungnya meliputi penciptaan rasa aman, perwujudan tatakota dan lingkungan yang nyaman dan asri serta peningkatan insfrastruktur. Adapun proses manajemen adalah bagaimana mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Proses bisnis tersebut selanjutnya dibreakdown ke dalam kata kunci yang merupakan perwujudan sasaran daerah Kabupaten Muna Barat. Sasaran Daerah ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja kepala daerah dimana setiap tahun akan dievaluasi pencapaiannya

TABEL 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius”	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan lama sekolah
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
				Meningkatnya pengembangan kehidupan religius, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat	Angka Kriminalitas
	2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas	Meningkatnya kapasitas infrastruktur pendukung penataan dan pengembangan wilayah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur transportasi dan perhubungan antar wilayah dalam daerah	Indeks Konektivitas wilayah
					Indeks Desa Membangun
	3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis	Meningktanya Produktivitas Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian utama	Pertumbuhan PDRB
					Pertumbuhan PDRB sektor unggulan

	agropolitan dan minapolitan				PDRB ADHK/kapita
				Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka
				Meningkatnya derajat kehidupan masyarakat lapisan bawah	Angka diatas garis kemiskinan Gini ratio
4. Mengembangkan Potensi Wisata, Lingkungan Hidup, yang Lestari dan Keragaman Budaya Daerah sesuai dengan kearifan Lokal	Meningkatnya pengembangan pariwisata berbasis keragaman budaya dan potensi alam	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Berkembang nya Daya tarik wisata berbasis keragaman budaya dan kondisi alam	PAD sektor pariwisata	
			Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Mingkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemkab Opini Laporan Keuangan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas penerapan standar pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan Dasar	Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar	

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah ditetapkan dan telah dilakukan perubahan sehubungan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat. Target yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kabupaten Muna Barat Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017- 2022 dimana telah dilakukan penyesuaian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PERUBAHAN 2022
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	9,7
	Angka harapan lama sekolah	14,45
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,15
Meningkatnya pengembangan kehidupan religius, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat	Angka Kriminalitas	12,5
Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur transportasi dan perhubungan antar wilayah dalam daerah	Indeks Konektivitas wilayah	0,91
	Indeks Desa Membangun	0,7
Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian utama	Pertumbuhan PDRB	8,25
	Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	6
	PDRB ADHK/kapita	23,50
Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,00

Meningkatnya derajat kehidupan masyarakat lapisan bawah	Angka diatas garis kemiskinan	89
	Gini ratio	0,3
Berkembang nya Daya tarik wisata berbasis keragaman budaya dan kondisi alam	PAD sektor pariwisata	100
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	94,75
Mingkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemkab	B
	Opini Laporan Keuangan	WTP
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
Meningkatnya kualitas penerapan standar pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan Dasar	Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar	100

Table : Indikator dan formulasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
Angka harapan lama sekolah	$EYS_a^t = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana:</p> <p><math>EYS_a^t</math> : Harapan lama sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math> ;</p> <p><math>E_i^t</math> : Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math> ;</p> <p><math>P_i^t</math> : Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math> ;</p> <p><math>i</math> : Usia (<math>a, a+1, \dots, n</math>) ;</p> <p><math>FK</math> : Faktor koreksi.</p>

Angka harapan hidup	$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$
Angka Kriminalitas	$\frac{\text{jumlah kejahatan yang selesai}}{\text{jumlah kejahatan yang dilaporkan}} \times 100$
Indeks Konektivitas wilayah	$\beta = \frac{e}{v}$ <p><b>Keterangan:</b>  <math>\beta</math> = Indeks konektivitas  e = Jumlah jaringan jalan  v = Jumlah simpul atau jumlah kota</p>
Indeks Desa Membangun	<p><b>IDM = 1/3 ( IS + IEK + IL )</b></p> <p>IDM : Indeks Desa Membangun  IS : Indeks Sosial  IEK : Indeks Ekonomi  IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)</p>
Pertumbuhan PDRB	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana:  t+1 = tahun pengamatan PDRB  t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>
Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	
PDRB ADHK/kapita	$\frac{PDRB}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$
Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$
Angka diatas garis kemiskinan	(100 - angka kemiskinan)
Gini ratio	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:  Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i  Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:  G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah  0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang  G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p>

PAD sektor pariwisata	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH
Nilai SAKIP Pemkab	
Opini Laporan Keuangan	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$
Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar	

Sumber : Indikator Kinerja dan formulasi Urusan penyelenggaraan tingkat sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Permendagri 86 Tahun 2017)

### 2.3. RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN KERJA
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	543.937.617.500
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.002.726.150
	PENDAPATAN TRANSFER	504.026.445.000
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.908.446.350
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	701.138.441.189
	BELANJA OPERASI	425.887.593.487
	BELANJA MODAL	144.835.771.669
	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.610.661.833
	BELANJA TRANSFER	113.804.414.200
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.245.076.058.689</b>

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) TAHUN 2022**

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**Table 3.1**  
Interval dan kriteria penilaian kinerja

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1.	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3.	65,01% ≤ 75%	Sedang
4	50,01% ≤ 65%	Rendah
4	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2022 yang diperbandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta target akhir tahun RPJMD 2022 tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.**  
Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Sasaran

**Sasaran 1**

**Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Angka rata-rata lama sekolah	Nilai	9,7	7,60	78,35
Angka harapan lama sekolah	Nilai	14,45	12,61	87,27

**Sasaran 2**

**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Angka harapan hidup	Nilai	70,15	70,39	100,34

**Sasaran 3**

**Meningkatnya pengembangan kehidupan religius, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Angka Kriminalitas	Nilai	12,5	63,37	50,70

**Sasaran 4**

**Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur transportasi dan perhubungan antar wilayah dalam daerah**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks Konektivitas wilayah	Nilai	0,91	0,90	98,90
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7	0,54	77,14

**Sasaran 5**  
**Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian utama**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Pertumbuhan PDRB	%	8,25	4,08	49,45
Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	%	6	6,5	108,33
PDRB ADHK/kapita	Juta	23,50	24,40	180,43

**Sasaran 6**  
**Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,00	2,4	2,40

**Sasaran 7**  
**Meningkatnya derajat kehidupan masyarakat lapisan bawah**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Angka diatas garis kemiskinan	Nilai	89	86,15	96,80
Gini Rasio	Nilai	0,3	0,32	1,07

**Sasaran 8**  
**Berkembangnya Daya tarik wisata berbasis keragaman budaya dan kondisi alam**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
PAD sektor pariwisata	%	1,00	0	0

**Sasaran 9**  
**Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam**

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	94,75	78,38	82,72

**Sasaran 10**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP PEMKAB	Predikat	B	CC	100%
Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100%

**Sasaran 11**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	88,35	98,17

**Sasaran 12**  
**Meningkatnya kualitas penerapan standar pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan Dasar**

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar	%	100	80	80

**Keterangan ;**

\* : Realisasi Hasil Pengelohan Sementara

\*\* : Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 dari 12 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Bupati Muna Barat pada tahun 2022, memiliki Realisasi kinerja lebih dari 90% dari yang telah ditargetkan. Sehingga termasuk kategori Sangat Tinggi dan Tinggi.

Masih banyak indikator yang belum mencapai target yang ditentukan tentunya menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 dan perencanaan kegiatan tahun 2023 agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

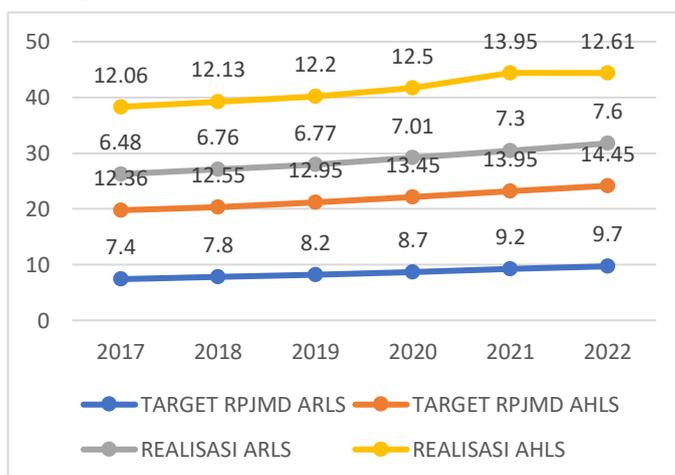
### 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA INDIKATOR UTAMA TAHUN 2022

#### 3.2.1. Sasaran 1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

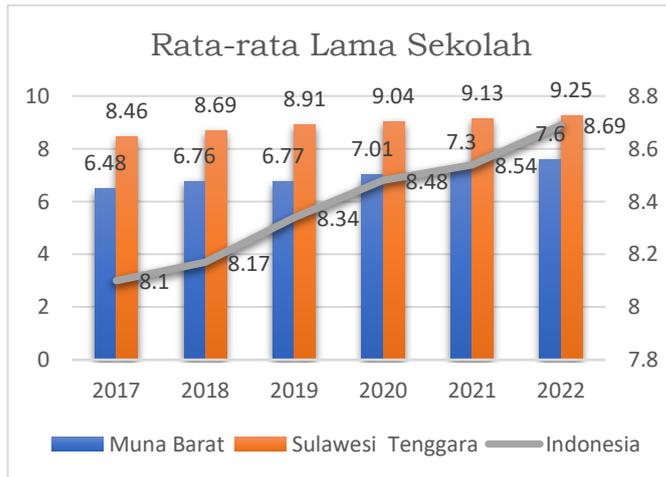
##### Ketercapaian Sasaran

Peningkatan kualitas pendidikan diukur dengan menggunakan 2 indikator; Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). ARLS menunjukkan tingkat lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas, sedangkan AHLS digunakan untuk mengestimasi harapan lama sekolah dimasa depan yang bisa dienyam dengan melihat rata-rata proporsi setiap kelompok umur yang bersekolah pada saat ini. Baik UNDP maupun BPS memiliki formula penghitungan dan rentang nilai/ skor yang sama untuk masing-masing indikator (ARLS 0 – 15 Tahun; AHLS 0 – 18 Tahun). Dengan demikian, target peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Muna Barat tahun 2022, ditunjukkan dari ARLS dan AHLS sebagaimana perhitungan dalam

**Gambar 3.1**  
Angka rata-rata lama sekolah dan  
Angka Harapan lama sekolah 2017-2022



tabel 3.3. ARLS yang diestimasi setidaknya 9,7 Tahun, terealisasi 7,6 Tahun. Capaiannya adalah 78,35%. Demikian juga AHLS, realisasinya yang diestimasi mencapai 14,45 Tahun terealisasi 12,61 Tahun. Jika kedua capaian tersebut digabungkan, maka tingkat capaian rata-rata menjadi 82,81 % dengan **predikat tinggi**.



Sebagai pembandingan, ARLS rata-rata nasional rilis data BPS terakhir, 2022, adalah sebesar 8,69, jauh diatas ARLS Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Muna Barat rata-rata ARLS jauh dibawah, yaitu 7,6 Khususnya indikator ARLS, Kabupaten Muna Barat memang menempati posisi perolehan dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Pendidikan yang ditunjukkan dari angka rata-rata lama sekolah sudah cukup bagus dari Target RPJMD 2017-2022, namun demikian masih banyak yang dibenahi, ditingkatkan pada tahun berikutnya



Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

**Tabel 3.3.**  
Pengukuran Capaian Sasaran

### Pengukuran Capaian Sasaran

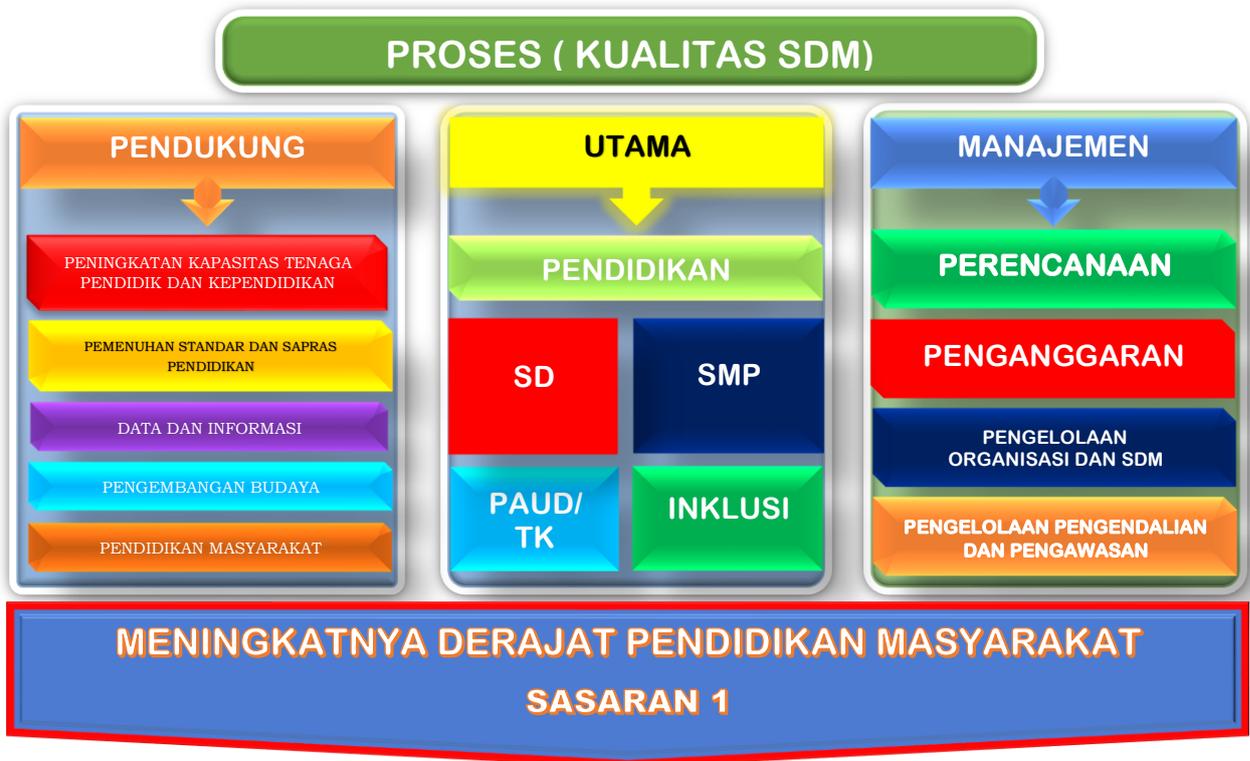
Indikator kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
ARLS	$RLS = \frac{\text{Jumlah Lama Sekolah Penduduk Usia 25th keatas}}{\text{Jumlah Penduduk usia 25th keatas}}$	9,7	7,6	78,35	<b>Tinggi</b>
AHLS	$EYS'_a = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$	14,45	12,61	87,27	
Rata-rata Capaian Kinerja			82,81		

Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

### **Framework Kebijakan**

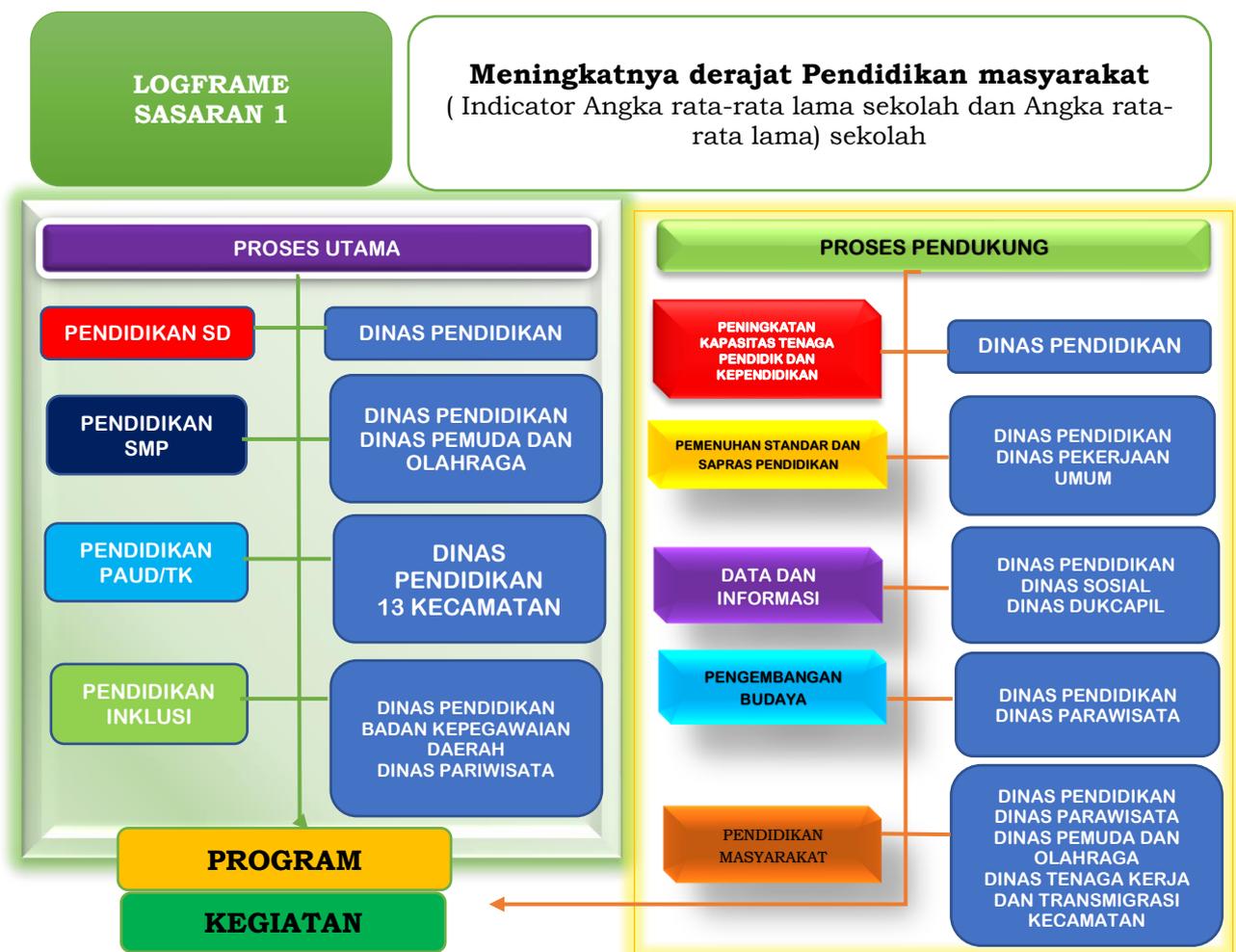
Sasaran peningkatan kualitas pendidikan memiliki skema intervensi yang sangat komprehensif. Sebagaimana ditunjukkan dalam proses bisnis dibawah ini, selain aspek manajemen, total terdapat aspek yang memiliki kontribusi terhadap kualitas pendidikan. Empat diantaranya yang paling utama adalah pendidikan (1) SD, (2) SMP, (3) Anak Usia Dini dan (4) Inklusi. 5 aspek lainnya yang tidak kalah penting namun memiliki peran pendukung adalah (1) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, (2) pemenuhan standar dan sarana prasarana pendidikan, (3) penguatan data dan informasi, (4) pengembangan budaya literasi, dan (5) pendidikan masyarakat dan pembinaan lembaga pendidikan ketrampilan

**Gambar 3.2**  
Proses Bisnis Sasaran 1  
Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat



Skema sebagaimana digambarkan dalam proses bisnis diatas mensyaratkan keterlibatan beberapa OPD yang memiliki ketugasan terkait. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan mengambil peran paling pokok, memasuki hampir semua aspek, baik utama maupun pendukung. Beberapa OPD lain yang ikut berkontribusi dalam aspek utama adalah Dispora (Pendidikan SMP), Kecamatan (TK/PAUD), dan DPMPPA (Pendidikan Inklusi). Aspek pendukung untuk pemenuhan sarpras dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, penguatan data dan informasi oleh Dinas Sosial, pengembangan budaya literasi oleh Dinas Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kecamatan. Dan digambarkan pada logframe sasaran 7 adalah

**Gambar 3.3**  
Logframe Sasaran 1  
Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat



Dinas Pendidikan memiliki beragam intervensi pada masing-masing aspek. Kegiatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran, pengelolaan prestasi siswa, pengelolaan BOS dan BOSDA, serta jaminan pendidikan daerah memperkuat aspek pendidikan, baik SD maupun SMP. Intervensi yang direncanakan untuk SD meliputi pendalaman dan tes pendalaman materi ujian, pendampingan penyusunan kurikulum, Bimtek penyusunan soal ujian dan pembelajaran matematika dan IPA, pembinaan melalui klinik sains, dan fasilitasi partisipasi dalam berbagai kejuaraan, Sedangkan intervensi untuk SMP hampir sama dengan SD, ditambah pelaksanaan pendidikan Agama berbasis afeksi, pengembangan minat bakat, olimpiade literasi, dan sekolah sehat.

Dinas Pemuda dan Olahraga mendukung aspek pendidikan SMP melalui fasilitasi tri lomba juang, pelatihan 6 cabang olahraga, seleksi dan pengiriman POPDA, serta seleksi dan pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO) di SMP. aspek utama lainnya, TK/PAUD dan Pendidikan Inklusi diampu Dinas Pendidikan dengan masing-masing mendapat dukungan dari Kecamatan

Dinas Pendidikan memiliki skema pengelolaan TK/PAUD yang meliputi pembinaan layanan, pendataan, dukungan operasional, pemberian insentif pendidik, gebyar TK/PAUD, pengadaan sarpras dan rehab sekolah, serta berbagai skema peningkatan SDM: workshop, peningkatan kompetensi, pelatihan pembelajaran media, uji kompetensi, dan bimtek kompetensi pedagogi, dalam hal pengelolaan TK/PAUD, dukungan Kecamatan juga menysar pembinaan TK/PAUD di masing-masing kelurahan/Desa.

Sementara itu, aspek pendidikan inklusi menekankan pada siswa (asesmen dan diklat vokasi siswa lambat), guru (workshop kurikulum ABK dan pemberian insentif guru pendamping khusus), sekolah (workshop pengelolaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan pengadaan sarana prasarana ). Melalui aspek peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan merencanakan pengembangan kompetensi Guru, pelatihan karya tulis ilmiah, administrasi sekolah dan pendidikan inklusi untuk guru/ GPK,

PPG dalam jabatan, pembinaan pegawai/ guru, pendampingan pengusulan angka kredit, penilaian kinerja kepala sekolah, dan induksi guru. Aspek pemenuhan standar dan sarpras pendidikan ditempuh melalui workshop manajemen SD dan SMP, penguatan manajemen SMP, pendampingan akreditasi, pelaksanaan evaluasi diri SMP, verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah, rehab ringan gedung SD, pengadaan meja, kursi, almari dan sarpras lainnya, dan fasilitasi lomba gugus depan unggul SD. Upaya pemenuhan sarpras tersebut didukung Dinas Pekerjaan Umum dengan Pembangunan dan rehab sekolah dan penyusunan DED Sekolah SD dan SMP

Intervensi terkait penguatan data dan informasi meliputi pelaksanaan KBS online, rangkuman data pendidikan, pengelolaan Dapodik dan informasi pendidikan, fasilitasi penyelenggaraan PPDB online, serta pengembangan dan pengelolaan aplikasi. Sementara itu, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendukung aspek ini melalui verifikasi lapangan data siswa yang membutuhkan jaminan pendidikan daerah namun belum teridentifikasi sebagai sasaran.

Untuk pendidikan masyarakat dan pembinaan LPK, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan ketrampilan dengan pendaftaran akreditasi Lembaga PNF, bintek akreditasi lembaga kursus dan uji kompetensi instruktur kursus, pendidikan vokasional, serta lomba lembaga kursus berprestasi. Sementara itu, Dinas Pariwisata mendukungnya melalui layanan di Taman Pintar, wisata alam dan kecamatan melalui fasilitasi lembaga kemasyarakatan di tiap kelurahan dan desa.

### **Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan**

Dengan adanya pasca pandemi Covid-19 yang dampaknya mulai terasa banyak kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang dipending atau dialihkan. Terkait pencapaian sasaran dimana pendidikan menjadi inti intervensi, setidaknya menyebabkan Adanya kebijakan refocusing anggaran menyebabkan beberapa aktivitas yang dirasa kurang urgent tidak

dilaksanakan, namun beberapa aktivitas lain yang bersentuhan langsung dengan upaya pencegahan dan penanganan pandemi yang tidak direncanakan sebelumnya harus dilaksanakan. Dari pelaksanaan intervensi sepanjang tahun 2022 sebagaimana dijelaskan, setidaknya terdapat beberapa persoalan yang dihadapi dilapangan. Salah satunya terkait upaya identifikasi anak putus sekolah. Data tersedia yang dimiliki adalah data siswa yang terdata di DAPODIK dan EMIS masing-masing sekolah. Untuk mengidentifikasi jumlah anak putus sekolah, data tersebut di-overlay dengan data kependudukan dari Dindukcapil. Untuk lebih mengerucutkan prioritas penanganan, overlay juga dilakukan dengan basis data masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah digunakan. Disini diasumsikan bahwa persoalan putus sekolah secara umum disebabkan problem ekonomi keluarga, sehingga kelompok yang berpotensi putus sekolah adalah kelompok miskin atau tingkat kesejahteraan rendah. Ada dua basis data terkait, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, dan Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Pemerintah Kabupaten Muna Barat Sebagai langkah antisipasi sementara, Dinas Pendidikan memanfaatkan jaringan diwilayah yang dimiliki. Skema Jam belajar Masyarakat (JBM) yang memiliki basis aktivitas tiap Desa yang masing-masing terdiri dari satu tim merupakan potensi yang bisa digali. Penanganan putus sekolah sementara di tahun 2022 ini adalah dengan membuka kanal pengaduan dari tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Barat. Disamping itu, upaya penanganan juga perlu dirumuskan secara komprehensif. Hal ini terutama untuk mengantisipasi jika alasan putus sekolah bukan beban finansial. Beberapa kemungkinan alasan yang lain termasuk keterbatasan fisik, psikomotorik dan mental (difabel), psikologis (misalkan korban bullying atau broken home) serta hukum. Untuk alasan-alasan tersebut, alokasi anggaran dalam bentuk jaminan Pendidikan daerah tentu tidak akan secara efektif menyelesaikan masalah. Alternatifnya, perlu adanya tim kolaboratif lintas sektor untuk bisa mengidentifikasi sasaran



ditingkatkan pada tahun berikutnya. berdasarkan data diatas, tingkat capaian peningkatan harapan hidup dihitung sebagaimana tabel berikut ini. Capaian diukur dari angka realisasi dibagi dengan angka yang menjadi target. Kemudian untuk mendapatkan skor dalam satuan persen, hasilnya dikalikan 100%. Dalam hal ini, angka realisasi yaitu 70,39. Realisasi yang di atas target menunjukkan bahwa sasaran pembangunan untuk meningkatkan harapan hidup ini sudah tercapai. Skor pencapaiannya adalah 100,34% atau terklasifikasi **sangat tinggi**

**Tabel 3.4**  
Pengukuran Capaian Sasaran 2

Indikator kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Angka Harapan Hidup	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	70,15	70,39	100,34	<b>Sangat Tinggi</b>

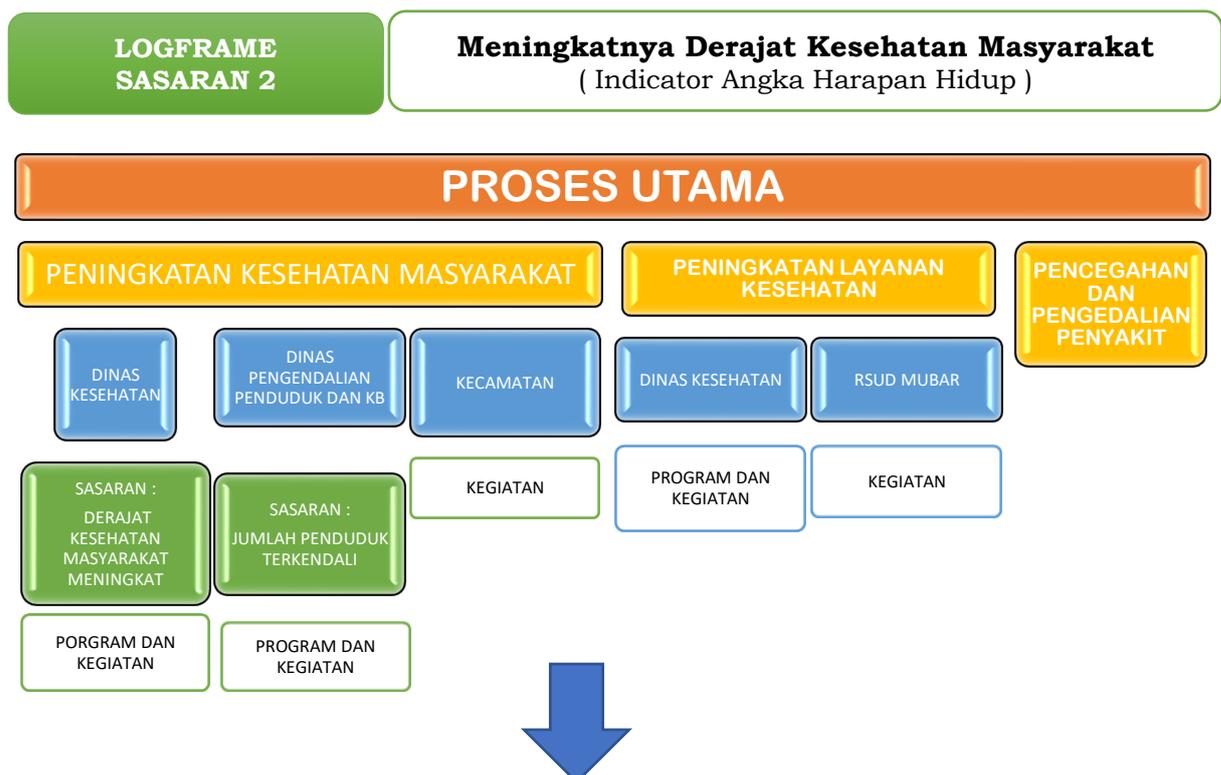
Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

**Gambar 3.5**  
Proses Bisnis Sasaran 2  
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat



Masing-masing elemen dalam aspek utama dan pendukung tersebut memiliki operasionalisasi kebijakan yang dibingkai dalam logical framework (logframe) berikut. Setiap elemen didukung satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki urusan atau kelompok urusan yang relevan, dimana Dinas Kesehatan memiliki peran terbanyak. Tingkatan peran masing-masing OPD bervariasi, mulai dari level sasaran, program, kegiatan maupun keluaran atau output. Proses utama dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan dukungan Dinas Dalduk dan KB, dan Kecamatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan RSUD Muna Barat untuk peningkatan layanan kesehatan. Proses pendukung dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan support beberapa dinas terkait, Dinas Sosial dan Dinas Dalduk dan KB untuk pengembangan data dan system informasi, serta Dinas PU dan Kecamatan untuk pemenuhan sarpras kesehatan.

**Gambar 3.6**  
Logframe Sasaran 2  
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat





Proses bisnis dan logical framework yang dibangun tersebut juga sangat relevan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. SPM tersebut mencakup isu layanan kesehatan. diantaranya layanan kesehatan sepanjang hidup, secara umum berdasarkan pengelompokan umur, yaitu layanan (1) ibu hamil dan (2) bersalin, (3) bayi baru lahir, (4) balita, (5) usia pendidikan dasar, (6) usia produktif, dan (7) usia lanjut. Sebagian besar intervensi peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat menyentuh aspek kesehatan ibu dan anak. Sedangkan instrument pencegahan dan pengendalian penyakit yang disupport semua aspek lainnya menasar pada 5 SPM terkait penyakit. Sementara itu, layanan untuk usia pendidikan dasar, produktif dan lansia ditangani mulai dari aspek screening kesehatan sampai penanganan lanjutan baik pencegahan maupun pengobatan tersebar disemua aspek utama dengan support semua aspek pendukung. Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan

Pada awal 2022, masing-masing OPD memiliki rencana kegiatan yang relevan. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan Dinas Kesehatan melalui pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. promosi kesehatan, penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja, serta pengujian

laboratorium kesehatan lingkungan. Instrument operasional berupa KIA Gizi, dimana intervensi yang dilakukan mulai dari aspek update pengetahuan layanan bagi petugas, peningkatan kapasitas kader, perencanaan, aktivitas surveilans, penyempurnaan kebijakan, pembinaan faskes, screening hipertiroid kongenital dan pemilihan ibu hamil. Promosi berbagai isu kesehatan dilakukan melalui institusi kesehatan, tempat ibadah, sarana kegiatan masal, dan penumbuhan keterlibatan masyarakat melalui Desa Siaga. Promosi yang menyentuh isu spesifik diwujudkan dengan perluasan kawasan anti rokok. Dinas Dalduk dan KB mendukungnya melalui kegiatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB, khususnya layanan KB, pembinaan Kampung KB, serta diseminasi pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi pada Remaja. Sementara itu, khususnya PKK sebagai organisasi yang bersinggungan dengan kerelawanan dalam layanan kesehatan masyarakat; serta pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya adanya pendampingan Posyandu. Masing-masing Kecamatan juga memiliki kontribusi melalui pembinaan social dan budaya masyarakat, berupa pembinaan kesehatan masyarakat baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Peningkatan layanan kesehatan merupakan core-business Dinas Kesehatan. Upaya peningkatan tersebut dilakukan melalui 3 program, yaitu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan upaya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar dilakukan dengan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat di Puskesmas. Layanan yang dicover termasuk untuk Ibu dan Anak, KB, pencegahan penyakit, promosi kesehatan, gizi, dan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan rujukan diwujudkan dalam layanan kesehatan di RSUD Muna Barat. Sementara itu, upaya pelayanan kesehatan difokuskan untuk mendorong akreditasi RS dan Puskesmas, kepemilikan JKN bagi penduduk, jaminan kesehatan penduduk miskin, meningkatkan cakupan kegawatdaruratan. Keseluruhan program tersebut juga disupport oleh pelayanan kesehatan di RSUD Muna Barat. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit baik menular maupun tidak menular

juga menjadi faktor penting peningkatan AHH. Secara umum, tantangan yang semakin mengemuka adalah pada naiknya tren penyakit tidak menular, diantaranya yang paling pokok adalah Diabetes Melitus (DM), Gangguan Jiwa, Hipertensi dan Kanker Serviks. Namun demikian, penyebaran penyakit menular juga tetap diantisipasi, diantaranya HIV/AIDs, Tuberculosis (TB), dan Demam Berdarah (DBD). Intervensi operasional untuk penyakit menular yang direncanakan diantaranya adalah surveilans/ penyelidikan/ pelacakan/ pemantauan epidemiologi, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, jentik nyamuk, kasus kusta; identifikasi kecenderungan penyebab kematian, pengendalian penyakit DBD dan TBC, foging DBD, Chikungunya, penanggulangan KLB, pemberian obat pencegahan massal, motivasi dan pemberian makanan tambahan pasien TB, penanganan dan peningkatan kapasitas layanan HIV/AIDs, imunisasi, serta diseminasi pengendalian dan tata-laksana penyakit menular. Penyakit tidak menular (PTM) diintervensi melalui deteksi dini, peningkatan kapasitas petugas kesehatan, surveilans, diseminasi informasi dan money PTM dan kesehatan jiwa, pengembangan pelatihan upaya kesehatan jiwa bagi tenaga pendidik di sekolah, Disamping aspek utama diatas, Regulasi Bidang Kesehatan juga menjadi pendukung penting peningkatan AHH. Dinas Kesehatan memiliki skema pembinaan regulasi sarana prasarana dan sertifikasi bidang kesehatan. Upaya yang dilakukan mencakup penyuluhan keamanan pangan, sertifikasi industry rumah tangga, penyuluhan hygiene dan sanitasi, serta layanan regulasi bagi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan penyehat tradisional. Sementara itu, aspek pendukung pengembangan data dan sistem informasi dilakukan beriringan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Dalduk dan KB. Dinkes fokus pada pengelolaan surveilans dan system informasi kesehatan. Dinsos ambil peran melalui pendataan PMKS dan PSKS. Sedangkan Dinas Dalduk dan KB mengelola data advokasi dan komunikasi informasi edukasi kependudukan dan KB. Pengembangan Tenaga Kesehatan juga dilakukan Dinkes melalui beberapa skema pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM

kesehatan, yaitu penyegaran, pelatihan dan updating data SDM, penilaian kompetensi jabatan fungsional, pembinaan dan pengawasan mutu, pemilihan tenaga kesehatan teladan Puskesmas. Terakhir, pemenuhan sarpras kesehatan dilakukan oleh Dinkes (diantaranya penyediaan dan monitoring penggunaan obat, vaksin dan alkes; bintek dan pelatihan tenaga farmasi), Dinas PUPKP (pemberian rekomendasi keandalan gedung, pendampingan teknis bangunan gedung dan pembangunan gedung kesehatan) dan Kecamatan (pembinaan kesehatan masyarakat).

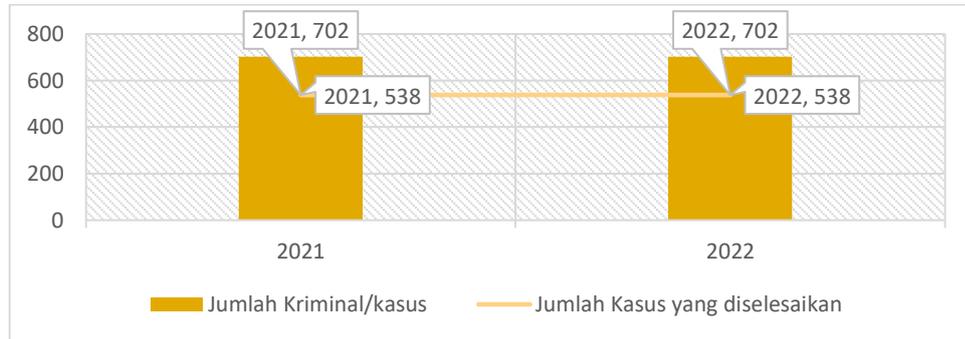
### **3.2.3.Sasaran 3 Berkembangnya kehidupan religius, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat**

#### **Pengukuran Capaian Sasaran**

Sasaran 3 merupakan bagian dari upaya mencapai misi ke-1 RPJMD, yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur”** Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur dari turunnya angka kriminalitas

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, sekaligus sebagai salah satu indikasi tingkat kesejahteraan itu sendiri. Disini diasumsikan bahwa banyak perbuatan kriminal dilatar-belakangi alasan kekurangan ekonomi yang diderita, sehingga tingginya kriminalitas menandakan banyak yang belum mencapai kesejahteraan ekonomi. Cakupan kriminalitas meliputi kejahatan konvensional, transnasional, pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibmas. Sementara itu, Perda merupakan system regulasi yang mengatur kehidupan social berjalan secara tertib. Adanya pelanggaran Perda mengindikasikan timbulnya potensi-potensi yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat untuk hidup dan beraktivitas.

**Gambar 3.7**  
Perbandingan Jumlah Kasus/Kriminal dan Kasus/Kriminal yang diselesaikan 2021 -2022



Angka kriminalitas sepanjang tahun 2021-2022 senantiasa tidak mengalami penurunan atau perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Muna Barat sudah cukup kondusif. realisasi angka kriminalitas diproyeksikan mencapai angka 702 dan 538 kasus yang diselesaikan. Realisasi tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh berkurangnya aktivitas masyarakat yang sadar tentang Tindakan kejahatan/kriminal, sehingga turut memberikan andil terhadap tindak kriminalitas yang muncul.

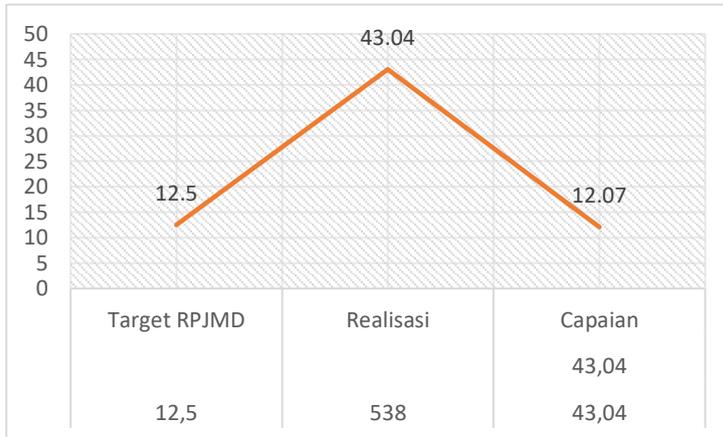
### Ketercapaian Sasaran

**Tabel 3.5**  
Pengukuran Capaian Sasaran 3

Indikator kinerja	Satuan	Tahun	Kasus	Selasaikan	Belum diselesaikan	Sumber Data
Angka Kriminalitas	Nilai	2021	702	538	164	BPS Muna Barat 2021-2022-2023
		2022	702	538	164	
	<b>Nilai Pengukuran</b>	<b>Target RPJMD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>		
		12,5	538	43,04		
		Realisasi kinerja		43,04		
	<b>Formula Hitung</b>	<b>Target RPJMD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>		
	$\frac{target - (Realisasi)}{-100}$	12,5	43,04	12,07	Sangat Tinggi	
	$\frac{target}{Capaian} \times 100$	<b>Nilai Capaian Kinerja</b>		96,56		

Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

**Gambar 3.8**  
Capaian Sasaran Penurunan Kriminalitas  
2021-2022



Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

**Gambar 3.9**  
Proses Bisnis Sasaran 3



Dari hasil olah nilai ketercapaian sasaran **sangat tinggi 96,56** dan indikator angka kriminalitas menurun dapat dilihat pada tabel olah data diatas pada target RPJMD sebesar 12,5 dengan realisasi kinerja 43,04 menurun pada capaian 12,07 atau rasio 0,97. Hal ini digambarkan Penurunan gangguan ketertiban dan ketenteraman didekati dengan 3 proses bisnis: Manajemen, Utama dan Pendukung. Disamping aspek manajemen, terdapat 2 skema intervensi utama yang digunakan, yaitu Preventif dan Represif. Preventif atau upaya pencegahan merupakan skema untuk mengantisipasi agar pelanggaran tidak dilakukan. Sedangkan Represif atau upaya penindakan merupakan skema untuk memberikan *punishment* bagi para pelanggar dengan tujuan memberikan efek jera dan tidak terjadi pelanggaran

serupa dikemudian hari. Sebagian besar dari upaya represif ini –yaitu terkait penindakan kriminalitas- tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, perlu keterlibatan stakeholder lain yang memiliki kewenangan lebih dominan, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Dalam Proses Bisnis diatas, keterlibatan aparat penegak hukum diakomodir dalam skema kerjasama. Karena tupoksi aparat penegak hukum diluar kendali kewenangan Pemerintah Kabupaten, meski krusial, skema tersebut menjadi aspek pendukung untuk mencapai sasaran 1 ini. Setiap skema intervensi, baik utama maupun pendukung, selanjutnya diturunkan kedalam *logical-framework* berbagai skema operasional turunan, yang pelaksanaannya dilakukan beberapa OPD sesuai Tupoksi masing-masing. OPD yang memiliki peran dominan adalah Satpol PP, yang memiliki ketugasan dalam upaya pencegahan sekaligus penindakan. Kantor Kesbang dan Kecamatan juga memiliki peran signifikan dalam upaya pencegahan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. OPD lainnya ikut berperan dalam upaya pencegahan, meliputi Dispora, Dindik, Dinsos, Dinas Dalduk KB, serta Bagian Tapem dan Kesra

### **Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan**

Sebagaimana disinggung sebelumnya, upaya penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dominan dilaksanakan oleh Satpol PP. OPD lainnya memberikan dukungan secara tidak langsung. Disamping itu, pelaksanaan kebijakan diwarnai dengan adanya Pandemi yang menginterupsi kelancaran kegiatan. Satpol PP sendiri sebagai leading sector pencapaian sasaran penurunan gangguan keamanan dan ketertiban, terutama pada tahun 2022. Meningkatnya peran serta masyarakat juga menjadi faktor pendorong secara tidak langsung terhadap penurunan jumlah pelanggaran di Kabupaten Muna Barat melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat dan sosialisasi yang bertujuan memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat, bukan hanya untuk mentaati peraturan perundang-undangan tetapi sekaligus sebagai subjek pendukung dalam menjaga dan mewujudkan

ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya dan Kabupaten Muna Barat pada umumnya.

### 3.2.4. Sasaran 4 Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur transportasi dan perhubungan antar wilayah dalam daerah

#### Ketercapaian Sasaran

Sasaran ini memiliki indikator yakni Indeks Konektivitas wilayah dan Indeks Desa Membangun. Indeks Konektivitas wilayah pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,90 atau capaian sebesar 98,9 dengan predikat sangat tinggi dibandingkan tahun 2021. Dan indeks desa membangun terealisasi dengan nilai 0,5 dari target 0,7 dengan capaian 77,14 dengan predikat tinggi. Dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2022 ini laju pertumbuhan Indeks daya saing infrastruktur daerah sedikit melambat walaupun tetap ada kenaikan. **Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur transportasi dan perhubungan antar wilayah dalam daerah** dengan indikator indekskonektivitas wilayah dan Indeks desa membangun kabupaten Muna Barat disajikan dalam bentuk tabel

**tabel 3.6**  
Capaian Sasaran 2021-2022

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks Konektivitas wilayah	Nilai	0,91	0,90	98,9
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7	0,54	77,14
Rata-rata Capaian Kinerja				88,02
Predikat			Tinggi	

Sumber : BPS Muna Barat 2023 (diolah)

## Pengukuran Capaian Sasaran

**Gambar 3.10**  
Capaian konektivitas Kabupaten Muna Barat  
2022



Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota =  $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$   
Dimana  $IK1 = \text{bobot} = 30 \times 0,90$  RKK = 0,27 IK 2 = Bobot = 70 \times 0,90 RKK = 0,63 Realisasi 2022 = 0,90

## Indeks Desa Membangun

Dalam pengukuran status desa terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) 1) Desa Sangat Tertinggal 2) Desa Tertinggal 3) Desa berkembang 4) Desa Maju 5) Desa Mandiri  
Adapun rentang skor pengukuran staus desa dalam Indeks Desa Membangun dari 0,27-0,29 Klasifikasi Status IDM dengan ambang batas sebagai berikut :

Desa Sangat Tertinggal	>0,491
Desa Tertinggal	> 0,491 < 0,599
Desa berkembang	>0,599<0,707
Desa Maju	>0,707<0,815
Desa Mandiri	>0,815

Indeks dari setiap variable menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun dirumuskan menjadi :

$$IDM = 1/3(IS \times IE \times IL)$$

Ket :

Is = Indeks Sosial

IE = Indeks Ekonomi

IL = Indeks Lingkungan

Sumber (idm.kemendesa.go.id)

Kabupaten Muna Barat IDM pada tahun 2022 dengan realisasi 0,54 dari target 0,7 dengan perhitungan Indeks Sosial = 0,11 Indeks Lingkungan = 159 Indeks Ekonomi = 4.08 = 163,19

$$\frac{1}{3} \times 163,19 = 0,54 \text{ Realisasi IDM Muna Barat}$$

Dengan capaian 77,14

3.2.5. Sasaran 5 Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian utama

### Pengukuran Capaian Sasaran

Sasaran ini memiliki indicator yakni Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan PDRB sector unggulan dan PDRB ADHK/kapita hal ini bisa dilihat pada grafik sebagai berikut.

**Tabel 3.7**  
Pengukuran Capaian Sasaran 5

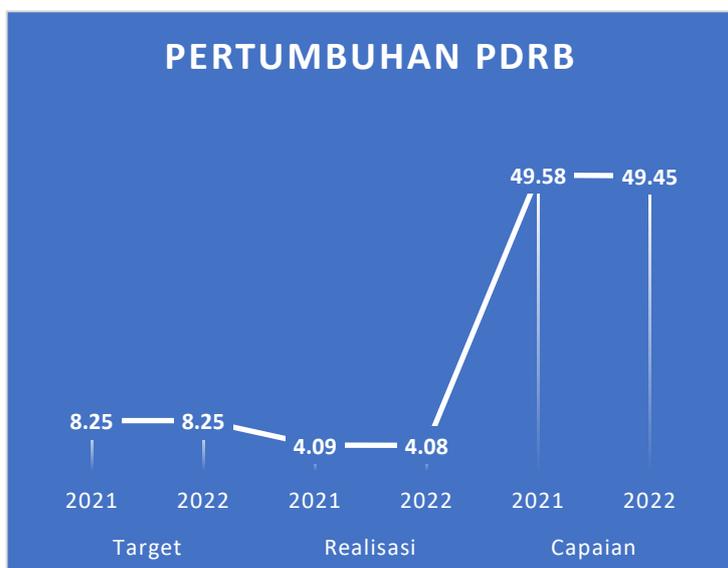
Indikator kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pertumbuhan PDRB	%	8,25	8,25	4,09	4,08	49,58	49,45

Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	%	6	6	4,6	6,5	76,67	108,33
PDRB ADHK/kapita	Juta	23,5	23,5	32,88	24,4	139,91	103,83

### Ketercapaian Sasaran

Dari tabel 3.4. terlihat Indikator Pertumbuhan PDRB pada tahun 2022 terealisasi 4.08 dengan target kinerja 8,25 dibandingkan dengan tahun 2021 terealisasi 4.09 dari target kinerja 8,25 atau tingkat pertumbuhan PDRB

**Gambar 3.11**  
Pertumbuhan PDRB  
2021-2022



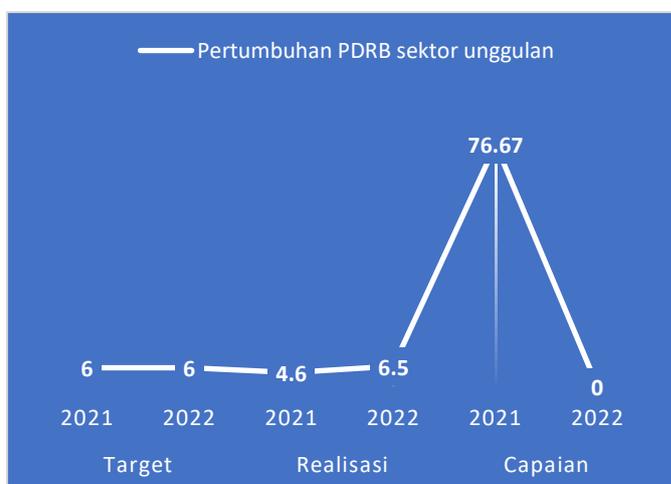
Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

mengalami penurunan dengan nilai 0,9 dari tahun 2021 artinya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kabupaten Muna Barat atas dasar harga berlaku tahun 2022 sebesar Rp. 3.070,00 miliar. Angka ini meningkat 282,88 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Muna Barat tahun 2022 meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Muna Barat tahun 2022 mencapai 4,08 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 4,09 persen. Secara umum penurunan ini disebabkan oleh semakin ketidakstabilnya perekonomian masyarakat di tengah-tengah kondisi pandemic dan harga BBM dan bahan pokok naik.

Masyarakat mulai mampu beradaptasi dengan kondisi yang semakin terbatas ruang gerakannya. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor dominan dalam pembentukan total PDRB. Kontribusi pertanian,kehutanan dan perikanan kategori ini mencapai 39,42 persen disusul peranan kategori konstruksi sebesar 20,37 persen, kemudian kategori perdagangan dan eceran mencapai 10,06 dan kategori pertambangan dan penggalian sebesar 10,29 persen. Sedangkan kategori lain masih dibawah 10 persen. Menurut komponen pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang tertinggi dalam pembentukan PDRB. Total pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 2,609,33 miliar rupiah terhadap total PDRB. Komponen lainnya adalah pembentukan modal tambah bruto sekitar 19,30 persen. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah kontribusi impor yang tinggi dalam perekonomian Muna Barat mencapai 29,25 persen. Besarnya impor menunjukkan besarnya ketergantungan Muna Barat dalam perekonomian Muna Barat.

Pertumbuhan PDRB sector unggulan pada tahun 2022 terrealisasi 6,5 dari target 6 dibandingkan tahun 2021 realisasi 4,6 dari target 6 yang artinya

**Gambar 3.12**  
Capaian Sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan 2021-2022



Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

pertumbuhan PDRB sector unggulan mengalami peningkatan yang signifikan hal ini di dominasi Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Muna Barat. Hal ini tercermin dari besarnya persentase pekerja yang berusaha pada sector pertanian. Mengingat persentase pekerja yang bekerja di sektor lain masih relatif kecil. Lapangan pekerjaan utama penduduk suatu daerah

mencerminkan tradisional atau tidaknya struktur ekonomi suatu daerah. Semakin dominan sektor pertanian sebagai sektor primer terhadap sektor lainnya, semakin tradisional struktur ekonomi daerah tersebut. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 kategori lapangan usaha yaitu Pertanian (mencakup pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), Industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan/konstruksi), dan Jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Dalam struktur PDRB Kabupaten Muna Barat, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor terbesar yaitu 38,68 persen dengan nilai tambah bruto (NTB) mencapai 1.012,6 miliar rupiah. Dari sisi ketenagakerjaan, ada sebanyak 49,91 persen dari total jumlah penduduk berumur 15 tahun yang bekerja. Hal inilah yang menjadikan pertanian memegang peranan utama dalam perekonomian Kabupaten Muna Barat.

PDRB ADHK/kapita pada tahun 2022 terrealisasi 24,4 dari target 23,5 dengan capaian 103,83 juta dibandingkan dengan tahun 2021 terrealisasi 32,88 dari target 23,5 dengan tingkat capaian 139,91 juta. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Muna Barat mengalami peningkatan dalam

**Gambar 3.13**  
Capaian Sasaran PDRB/Kapita  
2021-2022



Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

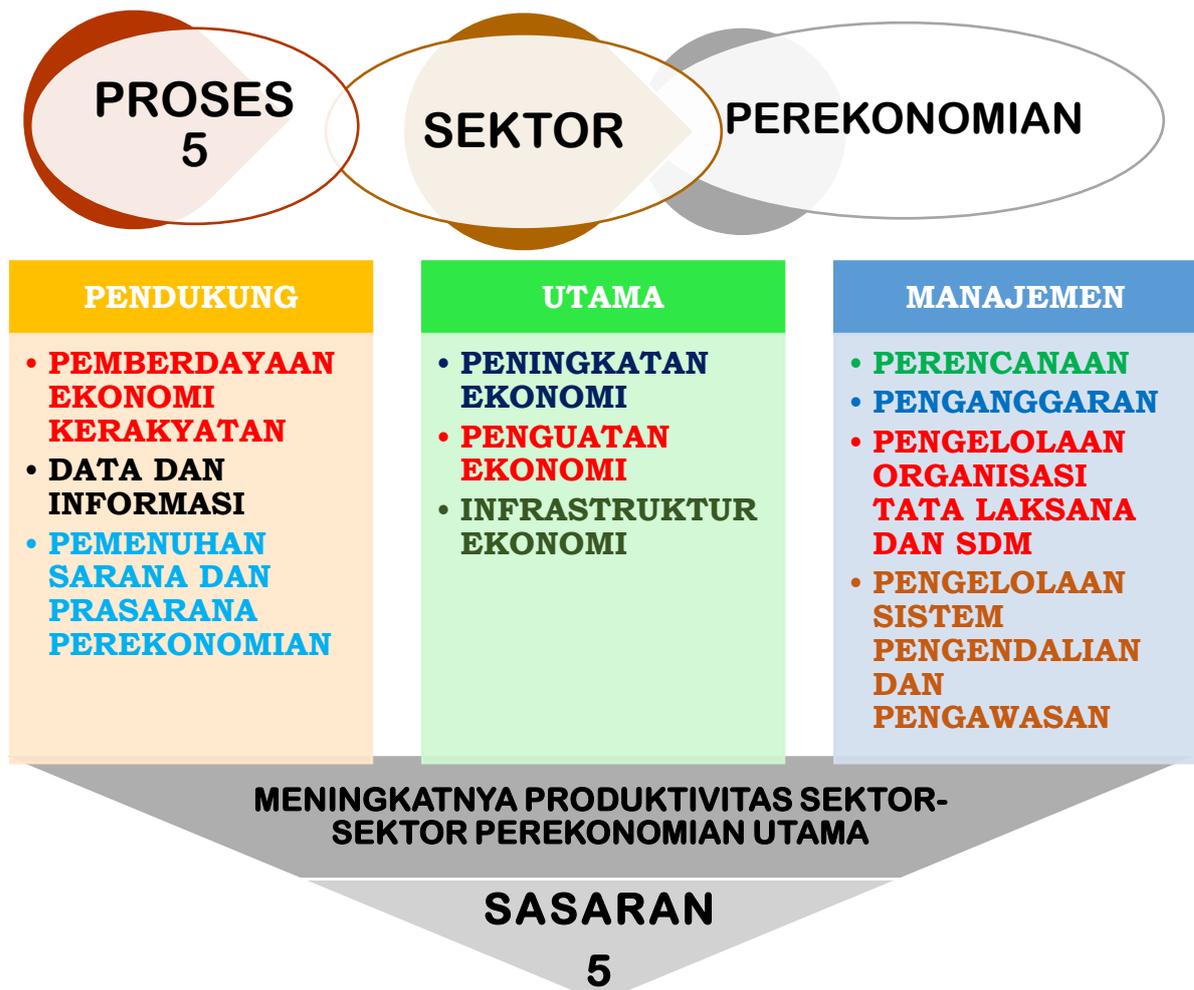
2 tahun terakhir. Pada tahun 2022, pengeluaran perkapita pertahun sebesar 32.875,90 Juta atau rata-rata perbulan 1.370,829 ribu rupiah, atau meningkat 57,31 dibandingkan tahun 2021. Rata pengeluaran perkapita per bulan sebesar 785,089 ribu rupiah per bulan, sebesar 20,54, lonjaknya

pengeluaran tahun 2022 di sebabkan adanya tingkat harga naik (BBM dan bahan rumah tangga) sehingga pemerintah menggenjot harga dengan system ketahanan Pangan

digambarkan dengan 3 proses bisnis: Manajemen, Utama dan Pendukung. Sebagai berikut

**Gambar 3.14**

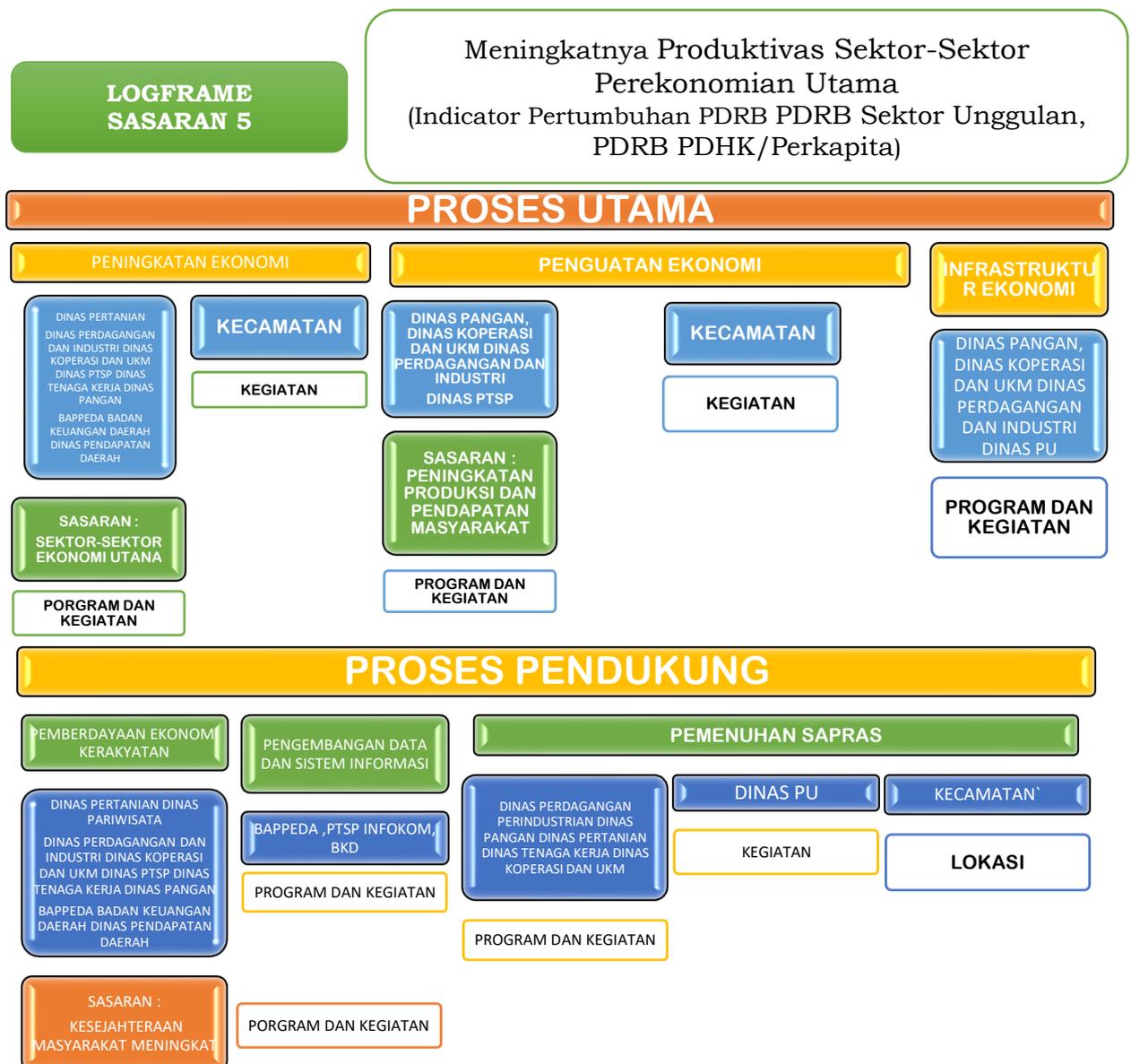
Proses Bisnis Produktivas Sektor-Sektor Perekonomian Utama



Dalam mencapai Produktivas Sektor-Sektor Perekonomian Utama, Pemerintah Kabupaten Muna Barat fokus pada 3 aspek utama yaitu Peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan ekonomi masyarakat dan Infrastruktur ekonomi, distribusi, konsumsi dan aspek pembinaan keamanan pangan Meskipun aspek produksi bukan hal yang ditekankan dalam strategi

peningkatan ekonomi namun Pemerintah Kabupaten Muna Barat tetap menjaga kestabilan supply pangan di wilayah Kabupaten Muna Barat. Aspek pendukung berupa pemberdayaan masyarakat dan aspek produksi juga berkontribusi terhadap peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Utama

**Gambar 3.15**  
**Logframe Sasaran 2**  
**Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Utama**



### 3.2.6. Sasaran 6 Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha

#### **Pengukuran Capaian Sasaran**

Isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah isu pengangguran. Konsep penganggur yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan bekerja (*jobles*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut mereka tidak biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

**Tabel 3.8**  
Pengukuran Capaian Sasaran 6

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Tahun</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat Pengangguran Terbuka	2021	%	1,2	2,84	2,37
	2022	%	1	2,40	2,40

Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

Dengan permula

$$\frac{\text{Target}(\text{realisasi})}{\text{Target}}$$

Menurunnya tingkat kesempatan kerja juga berdampak pada tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran mencapai 2,84 persen di tahun 2021, menurun menjadi 2,40 persen di tahun 2022. Hal ini berarti setiap 100 angkatan kerja, rata-rata 2-3 orang diantaranya belum bekerja atau belum terserap dalam pasar kerja. Semakin meningkatnya jumlah pengangguran juga bisa dibaca sebagai ketidakbaikan perekonomian suatu wilayah. Sebab pada negara-negara berkembang seseorang tidak bisa bertahan hidup dalam keadaan terus menganggur tanpa bekerja. Negara tidak memberikan jaminan penghasilan kepada para penganggur. Setiap angkatan kerja dipastikan akan berusaha mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## Ketercapaian Sasaran

Angka pengangguran menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan usaha. Persentase pengangguran di Kabupaten Muna Barat sebesar

**Gambar 3.16**  
Capaian Indikator Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka 2021-2022

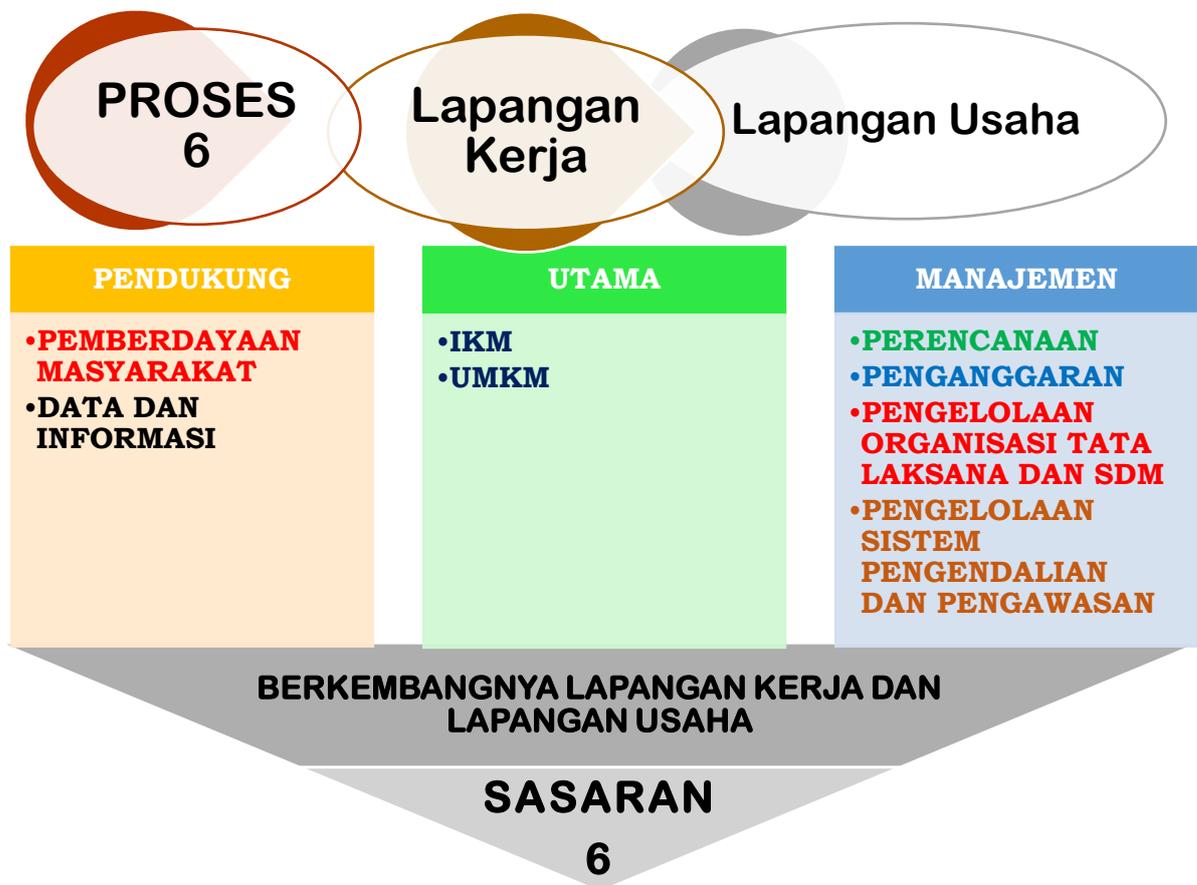


Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

2,84 persen ditahun 2021 dan pada tahun 2022 turun sebesar 2.04 persen atau pada tahun 2021 capaian sebesar 2, 37 persen belum mendekati 1 dari target RPJMD dan tahun 2022 capain sebesar 2,40 persen belum mendekati 1 dari target RPJMD dengan tingkat rasio 0,98 persen yang artinya pengangguran di Kabupaten Muna Barat menunjukkan setiap tahun terjadi penurunan pengangguran terbuka dikarenakan lapangan usaha dalam penyerapan tenaga kerja dalam suatu kurun waktu tertentu memberikan gambaran perubahan struktur perekonomian suatu daerah. Lapangan pekerjaan utama penduduk suatu daerah mencerminkan tradisional atau tidaknya struktur ekonomi suatu daerah. Semakin dominan sektor pertanian sebagai sektor primer terhadap sektor lainnya, Secara umum, peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT), tidak hanya menunjukkan rendahnya daya serap dunia kerja, lebih dari itu, merupakan suatu indikator adanya kondisi perekonomian yang tidak terus membaik secara agregatif dan tidak lebih berkualitas. Dikhawatirkan meningkatnya tingkat pengangguran juga dibarengi dengan meningkatnya angka kemiskinan

digambarkan dengan 3 proses bisnis: Manajemen, Utama dan Pendukung. Sebagai berikut

**Gambar 3.17**  
Proses Bisnis Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha



3.2.7. Sasaran 7 Meningkatnya derajat Kehidupan masyarakat lapisan bawah

### Pengukuran Capaian Sasaran

**Tabel 3.9**  
Pengukuran Capaian Sasaran 7

Indikator kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Predikat
Angka diatas garis kemiskinan	89	86,15	96,80	<b>Sangat Tinggi</b>
Gini Rasio	0,3	0,32	106,67	
Rata-rata Capaian Kinerja			101,73	

Predikat capaian sasaran 7 Indicator kinerja Angka diatas garis kemiskinan dengan target akhir RPJMD Tahun 2022, 89 terrealisasi 86,15 dengan capaian 96,80 dan gini ratio dengan target akhir RPJMD Tahun 2022 0,3 dengan realisasi 0,32 mencapai 106,67 dengan rata-rata capain kinerja 101,73 ada pada level Sangat Tinggi.

**Tabel 3.10**

Garis Kemiskinan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muna Barat 2017- 2022

<b>Tahun</b>	<b>Garis kemiskinan Kapita</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Presentase Penduduk miskin</b>
<b>2018</b>	<b>316.009</b>	<b>11,39</b>	<b>14,17</b>
<b>2019</b>	<b>342.811</b>	<b>11,52</b>	<b>13,84</b>
<b>2020</b>	<b>357.477</b>	<b>11,32</b>	<b>13,30</b>
<b>2021</b>	<b>367.868</b>	<b>11,55</b>	<b>13,96</b>
<b>2022</b>	<b>382.129</b>	<b>11,56</b>	<b>13,85</b>

Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

Sasaran Meningkatnya derajat Kehidupan masyarakat lapisan bawah dengan **indikator angka diatas garis kemiskinan** Menurun diukur dengan Angka kemiskinan BPS, yaitu persentase jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan terhadap keseluruhan penduduk Kabupaten Muna Barat. Garis kemiskinan sendiri merupakan batas nilai rupiah pengeluaran konsumsi (makanan dan non makanan) perkapita perbulan.

**Tabel 3.11**  
Gini Ratio

Indikator kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
Gini ratio	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:                      P<sub>i</sub> : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i                      Q<sub>i</sub> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:                      G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah                      0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang                      G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	0,3	0,32	106,67	<b>Sangat Tinggi</b>
Rata-rata Capaian				106,67	

Sumber : Analisis Bappeda Kabupaten Muna Barat 2022

Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk menurun menggunakan indikator Indeks Ketimpangan Pendapatan. Indeks Ketimpangan Pendapatan atau Indeks Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. target Indeks Gini 0,3 pada akhir RPJMD dengan realisasi 0,32 dengan capaian 106,67%

### Ketercapaian Sasaran

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki

**Gambar 3.18**  
Garis Kemiskinan Kabupaten Muna Barat  
2018 - 2022



Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Muna Barat mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2018-2022. Garis kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp. 367.868,- per kapita/bulan dan meningkat menjadi Rp. 382.129,- per kapita/bulan di

tahun 2022. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai P1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan nilai P1 yang semakin besar menunjukkan beban penduduk miskin untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan semakin berat. P1 pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2021 dari 2,03 menjadi 1,99 hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menjauh.

Untuk Tahun 2022, BPS menetapkan garis kemiskinan Kabupaten Muna Barat Rp 382,129,- perkapita perbulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan baseline untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan

**Gambar 3.19**  
 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Muna Barat 2018 - 2022



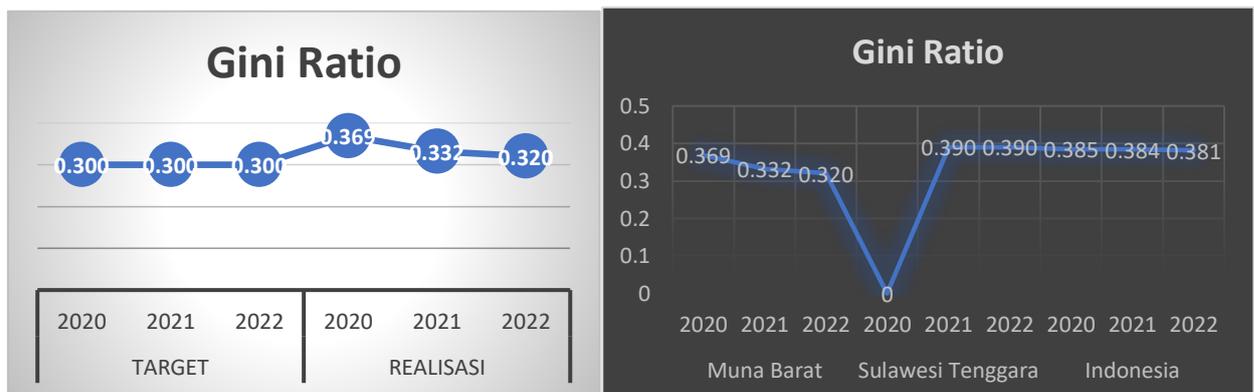
Sumber : BPS Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Muna Barat. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal. Jumlah penduduk miskin di Muna Barat mengalami peningkatan

selama periode 2021-2022. Tahun 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 11,56 ribu jiwa, meningkat 0,01 ribu jiwa dibanding tahun 2021 yang hanya sebanyak 11,55 ribu jiwa. Jika dilihat dari persentase terhadap jumlah penduduk Muna Barat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Muna Barat mengalami penurunan sebesar 0,11 persen. Dari yang sebelumnya mencapai 13,96 persen pada tahun 2021 menjadi 13,85 persen di tahun 2022.

**Gambar 3.20**

Target dan Realisasi Gini Ratio Kabupaten Muna Barat 2020 - 2022



Sumber : Analisis Bappeda Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

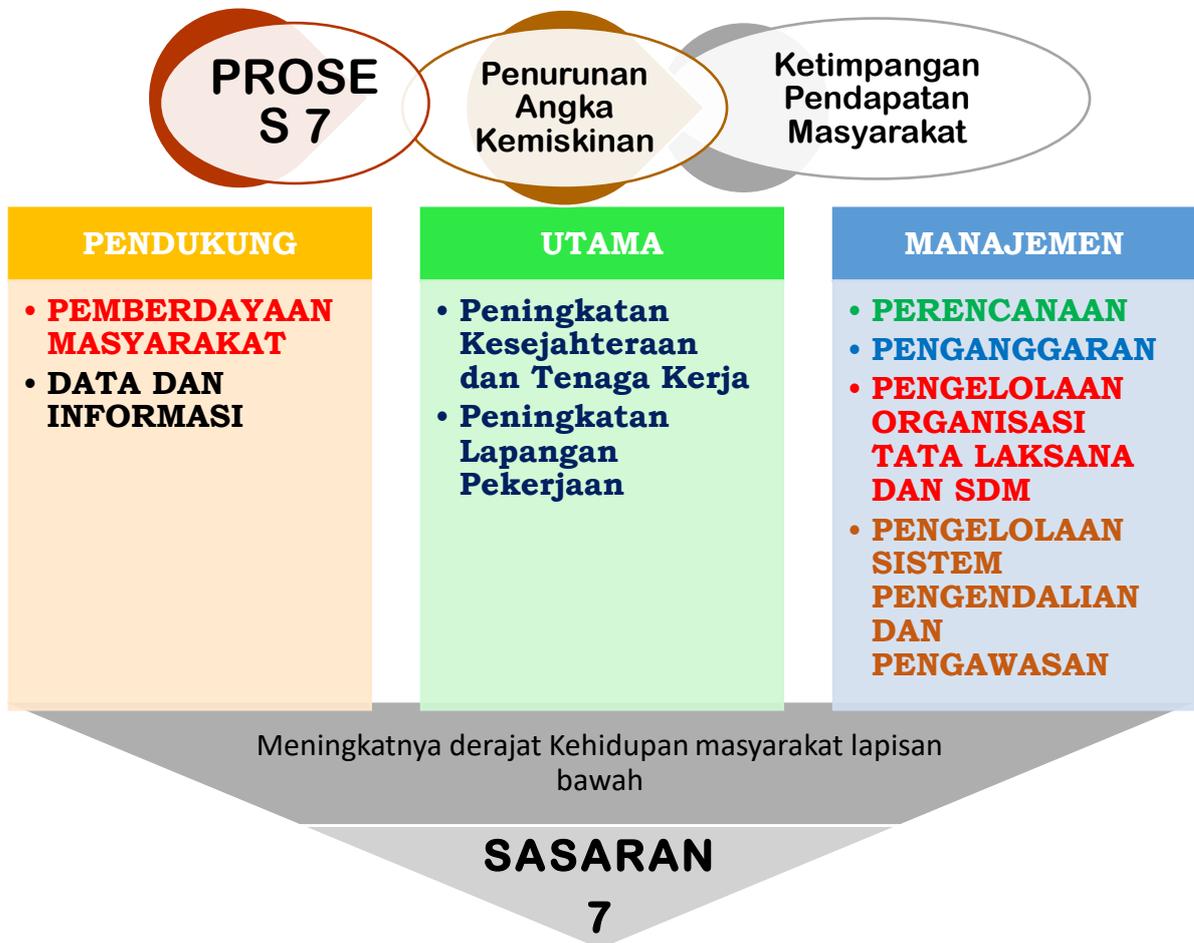
Mendasarkan hasil proyeksi Bappeda dengan mempertimbangkan trend angka gini rasio pada tahun sebelumnya, serta penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan sebagai dampak pasca Pandemi Covid-19, realisasi Gini rasio pada tahun 2022 sebesar 0,320. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan target dan naik 0,012 poin dibandingkan tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,300, masih terdapat selisih 0,020 poin melebihi capaian target. Jika melihat gini rasio Sulawesi Tenggara dan Nasional, gini rasio Kabupaten Muna Barat lebih rendah dibanding Sulawesi Tenggara dan lebih tinggi dibandingkan nasional. Hal ini tentu menjadi catatan dalam menyusun program dan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sehingga kesenjangan dengan masyarakat berpenghasilan tinggi tidak semakin lebar.

## Framework Kebijakan

Sasaran Meningkatnya derajat Kehidupan masyarakat lapisan bawah Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun dilakukan melalui penyediaan kesempatan kerja, penguatan usaha dan industri berbasis rakyat serta penurunan kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun sebagaimana ditunjukkan dalam proses bisnis dibawah ini. Selain aspek manajemen, terdapat 2 (dua) aspek utama yang memiliki kontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk yaitu peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM. Sementara 2 (dua) aspek pendukung antara lain Penempatan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

**Gambar 3.21**

Proses Bisnis Meningkatnya derajat Kehidupan masyarakat lapisan bawah



### ***Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan***

Kegiatan intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah antara lain : pemberian pelatihan bagi angkatan kerja, pameran bursa kerja (job fair), penempatan tenaga kerja, padat karya infrastruktur, serta pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk menetapkan Upah Minimum berdasarkan survey kebutuhan hidup masyarakat, perlindungan tenaga kerja melalui kerjasama tripartite daerah, serta pembinaan hubungan industrial perusahaan. Beberapa factor pendorong yang dijumpai dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antara lain : 1) Kualitas produk yang dipamerkan meningkat 2) Kolaborasi metode daring dan offline sudah mulai dirintis 3) Penerapan protocol kesehatan dalam penyelenggaraan pameran 4) Adanya himbauan yang mendorong ASN dan masyarakat lokal untuk membeli produk UKM local

#### **3.2.8. Sasaran 8 Berkembangnya Daya tarik wisata berbasis keragaman budaya dan kondisi alam**

Berdasarkan data BPS Muna Barat 2023 memiliki kurang lebih 150 obyek wisata. Bahkan setiap obyek wisata memiliki lebih dari satu potensi, yakni sumber daya alam mulai dari gunung, rimba, laut, air, pantai dan seni budaya. Kelima potensi alam dan satu hasil budaya (kearifan lokal) menjadi inti bisnis pariwisata di Kabupaten Muna Barat Melalui kelima tersebut sudah seharusnya, Pendapatan Asli Daerah pun bertambah mulai dari retribusi, dan pajak restoran, hotel, dan fasilitas penunjang lainnya.

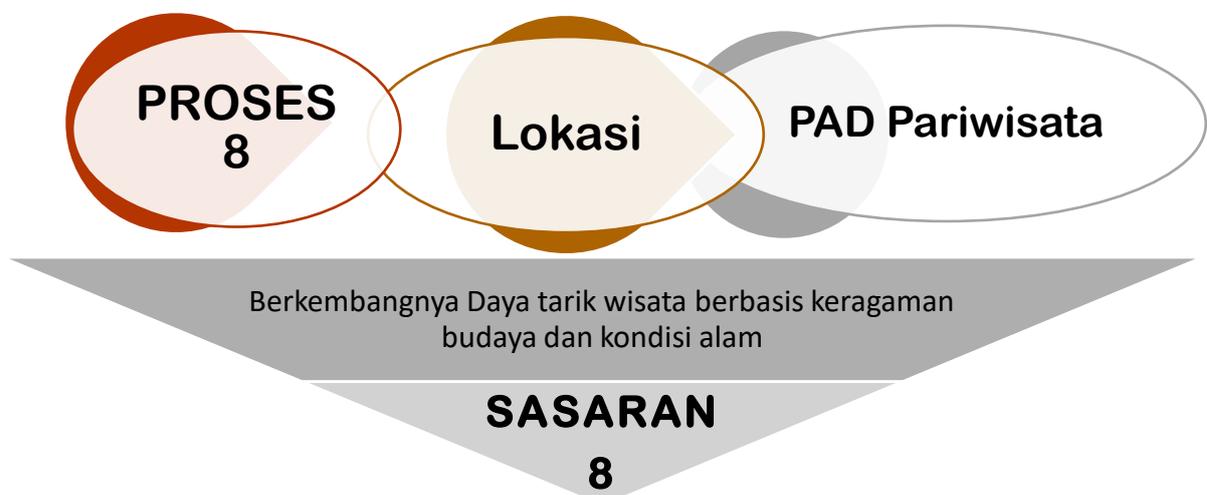
Pada sasaran 8 Berkembangnya Daya tarik wisata berbasis keragaman budaya dan kondisi alam dengan indicator PAD Pariwisata itu belum di laksanakan karena Peraturan Daerah tentang mekanisme Kontribusi PAD disektor wisata belum ada yang bahan acuan untuk Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Dengan strategi kedepan dengan pengusulan draf PERDA tahun 2023 tentang PAD Terkait dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Muna Barat, Kelompok Kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang terdiri dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Kelompok KB Pria, Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS), dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dapat memainkan perannya dalam bentuk atraksi wisata atau penjualan produk sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mengangkat citra pariwisata di Kabupaten Muna Barat sekaligus meningkatkan kunjungan wisata. Pada akhir Tahun RPJMD 2022 Target PAD Pariwisata 1 lokasi dan belum terrealisasi dengan belum adanya PERDA yang di keluarkan

Pemerintah Daerah semakin memiliki kebebasan untuk mengolah berbagai potensi daerahnya termasuk salah satunya obyek dan daya tarik wisata. Kebebasan tersebut tiada lain adalah dengan jaminan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Pemeritahan Daerah, dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari kedua UU tersebut Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, lugas dan bertanggung jawab.

**Gambar 3.22**

Proses Bisnis Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha



### 3.2.9. Sasaran 9 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam

#### Pengukuran Capaian Sasaran

Sasaran 9 (Sembilan) ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi keempat yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal dan tujuan Meningkatnya pengembangan pariwisata berbasis keragaman budaya dan potensi alam Sasaran ini diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daerah. Realisasi IKLH pada tahun 2022 sebesar 78,38%. Angka ini meningkat dari tahun 2021 sebesar 71,38

Selama dua tahun berturut-turut, nilai IKLH cenderung naik. Hal ini wajar karena faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran badan air dan pencemaran udara yang terus meningkat dan terus berkurangnya tutupan vegetasi karena pembangunan atau alih fungsi lahan. Akan tetapi, untuk tahun 2022 ini nilai IKLH justru meningkat. Faktor yang dianggap mempengaruhi hasil

Capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 82,73% dengan kategori **Tinggi**. Hasil pengukuran kinerja sasaran “Kualitas lingkungan hidup meningkat” dan persentase Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terlihat sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
Pengukuran Capaian Sasaran 9

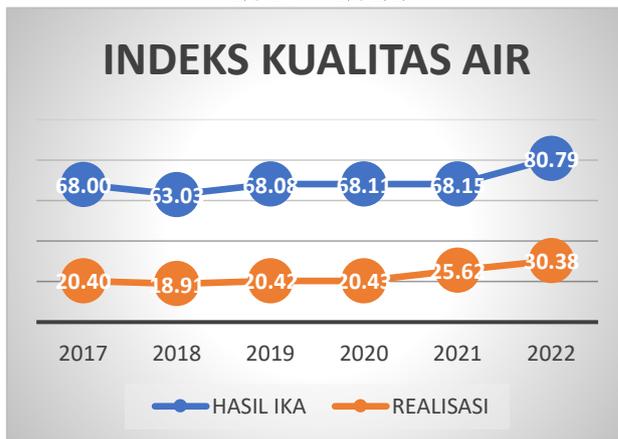
TAHUN	TARGET RPJMD	HASIL			REALISASI			IKLH	capaian RPJMD	Ket
		IKA	IKU	IKTL	IKA (30%)	IKU (30%)	IKL (40%)			
2017	92,00	68,00	95,50	0,00	20,40	28,65	n.a	49,05	53,32	Permen LHK No 05 Tahun 2014
2018	94,00	63,03	95,58	0,00	18,91	28,67	n.a	47,58	50,62	
2019	94,00	68,08	95,88	0,00	20,42	28,76	n.a	49,19	52,33	
2020	94,25	68,11	95,85	40,56	20,43	28,76	16,22	65,41	69,40	
		IKA	IKU	IKL	IKA (0,376)	IKU (0,405)	IKL (0,219)			
2021	94,50	68,15	90,03	42,43	25,62	36,46	9,29	71,38	75,53	Permen LHK No 27 Tahun 2021
2022	94,75	80,79	95,59	42,43	30,38	38,71	9,29	78,38	82,73	

Sumber : Analisis Bappeda Kab Muna Barat Tahun 2023 (diolah)

## Ketercapaian Sasaran

Perhitungan IKLH berasal dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Secara detail Persentase Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Muna Barat pada tahun 2017- 2022 adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.21**  
Indeks Kualitas Air Muna Barat  
2017 - 2022

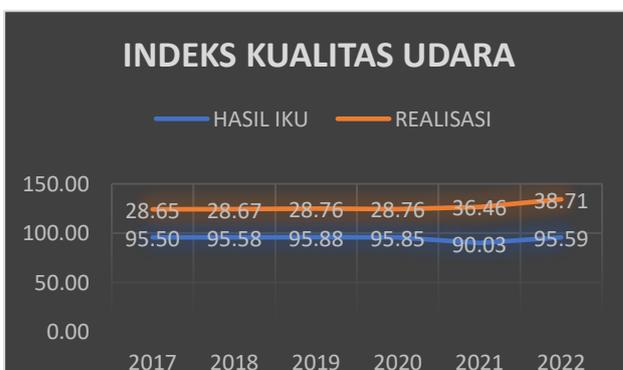


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna Barat (diolah)

Data Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari hasil pengujian terhadap Pemenuhan baku mutu (baik cemar ringan/sedang/berat) dan pada tahun 2022 nilai indeks kualitas air adalah 80,79 masih tergolong baik. Data menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Muna Barat mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh kesadaran

masyarakat muna barat akan pentingnya menjaga kelestarian sungai seperti pembuangan limbah secara benar ke Instalasi Pengolahan Air Limbah

**Gambar 3.22**  
Indeks Kualitas Udara Muna Barat  
2017 - 2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna Barat (diolah)

Nilai indeks kualitas udara di Kabupaten Muna Barat pada umumnya masih tergolong **sangat baik**. Data indeks kualitas udara (IKU) pada tahun 2022 dengan nilai hasil pengujian 95,59 dengan hasil; capaian 38,71% ( rumusan  $IKU \times 0,405$ ) diperoleh dari hasil pengujian

terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu: SO2 dan NO2. Lokasi pengambilan sampel mewakili 4 unsur : permukiman, industri, perkantoran/publik dan transportasi. Perhitungan Kualitas Udara menggunakan 2 parameter yaitu NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan parameter SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya

**Gambar 3.23**  
Indeks Kualitas Lahan Muna Barat  
2017 - 2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna Barat (diolah)

Nilai indeks kualitas lahan/tutupan lahan pada tahun 2017 s.d. 2019 masih belum dilakukan perhitungan data riil pada tahun 2020 s.d 2022 data Indeks Kualitas Lahan/Tutupan di Kabupaten Muna Barat memperoleh nilai IKL 40,56 (2020) 42,43 (2021-2022) Data indeks kualitas

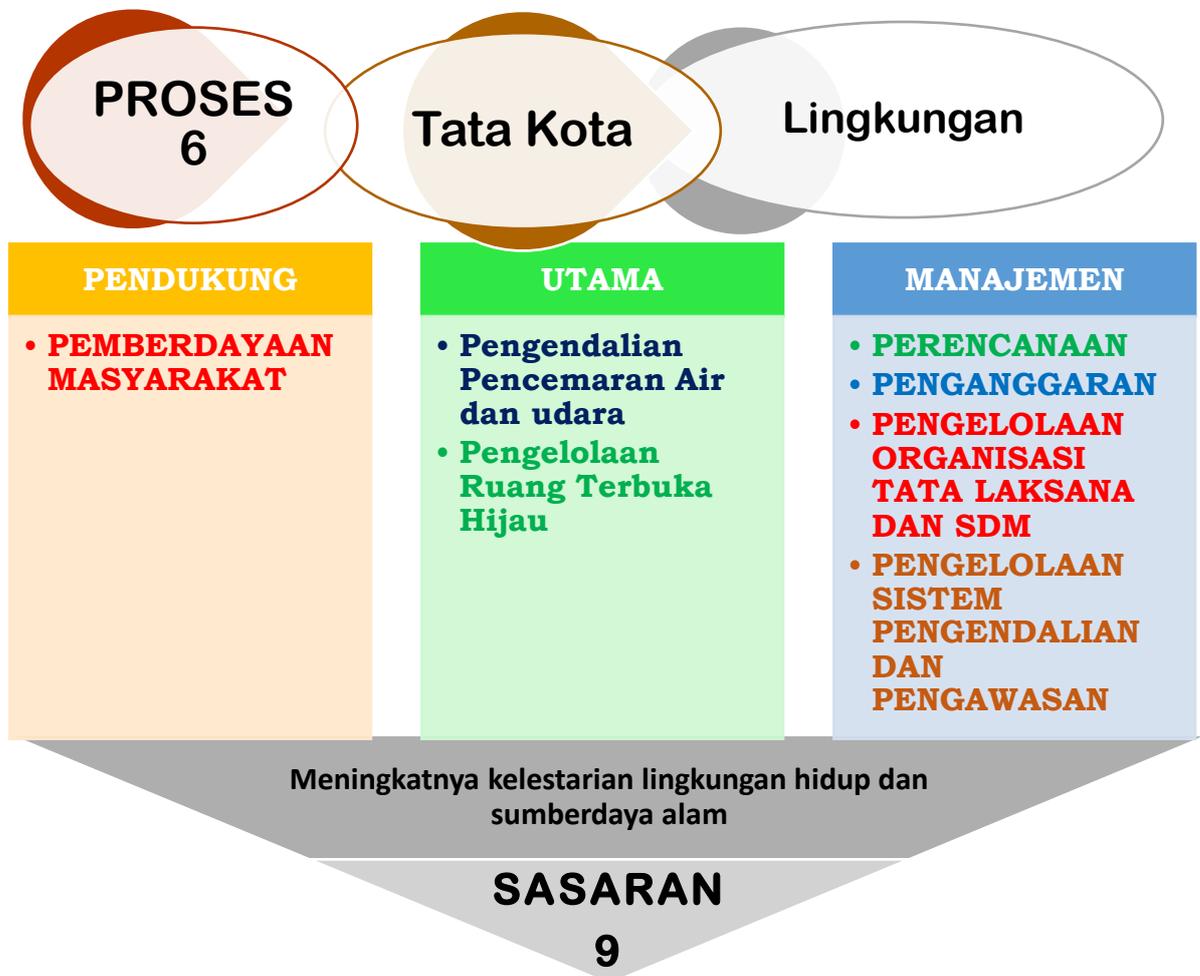
lahan (IKL) diperoleh dari perhitungan RTRW dan RTH (RUANG TERBUKA HIJAU)

### **Framework Kebijakan**

Beberapa skema kebijakan telah disiapkan untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut. Dalam framework proses bisnis, perangkat kebijakan dibagi kedalam 3 proses; manajemen, utama dan pendukung. Proses manajemen merupakan prasyarat agar suatu skema kebijakan bisa dijalankan terdiri dari perencanaan; penganggaran; pengelolaan organisasi, tatalaksana dan SDM; serta pengendalian dan pengawasan. Sementara itu, skema kebijakan utama terdiri dari Pengendalian Pencemaran Air dan Udara serta

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik. Sedangkan proses pendukungnya adalah pemberdayaan masyarakat

**Gambar 3.24**  
Proses Bisnis Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam



Terdapat 6 OPD yang memiliki peran pada proses utama adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Perumahan dan pemukiman. Sedangkan pada proses pendukung, terdapat 2 OPD yakni dinas Kesehatan dan 14 Kecamatan pada aspek pemberdayaan masyarakat

**Gambar 3.25**  
Logframe Sasaran 9



s

***Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan***

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup antara lain :

- 1) Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai
- 2) Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh ulu-ulu sungai yang didukung oleh masyarakat di wilayah pinggiran sungai, mampu mengurangi pembuangan sampah ke sungai
- 3) Guna mengurangi pembuangan sampah ke sungai, maka bagi usaha yang membuang limbah ke sungai pemberian izin dilakukan secara ketat serta tetap dilaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha yang sudah beroperasi
- 4) Pemantauan Evaluasi Kegiatan Udara Perkotaan (EKUP) yang memantau emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan emisi udara tidak bergerak di beberapa ruas jalan Kabupaten Muna Barat setiap tahun sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Muna Barat
- 5) Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan yang bersifat kecil seperti pembersihan di RTHP Permukiman

### **3.2.10. Sasaran 10 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah**

#### **Pengukuran Capaian Sasaran**

Sasaran strageis 10 ini merupakan upaya untuk mencapai misi ke lima yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih”. Untuk mengukur sasaran ke 10 (sepuluh) ada 2 (dua) indicator kinerja yang digunakan yakni nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun rata-rata capaian kedua indikator sasaran ini adalah 100% dengan kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran kinerja sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat terlihat sebagai berikut

**Tabel 3.12**  
Pengukuran Capaian Sasaran 9

Indikator kinerja	Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP PEMKAB	Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP	B	CC	50%
Opini Laporan Keuangan	Hasil Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	0	0%
Rata-rata Capaian Kinerja				50%
Predikat			Sangat Rendah	

Sumber : Sekertariat Daerah Bag. Ortala dan BKD Kab Muna Barat 2022

**Tabel 3.13**  
Target dan Realisasi Capaian Sasaran 10 dalam RPJMD 2017-2022

Sasaran	Indikator kinerja	Target/Realisasi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Target	C	C	CC	CC	B	B
		Realisasi	C	C	C	CC	CC	CC
	Opini Laporan Keuangan	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber : Sekertariat Daerah Bag. Ortala dan Bappeda Kab Muna Barat 2022

**Tabel 3.14**  
 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat  
 Tahun 2017-2022

Indikator kinerja	NILAI TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Hasil Evaluasi	na	na	na	na	51,13	*54,88
Tingkat Akuntabilitas	C	C	C	CC	CC	CC
Kinerja	>25-50	>25-50	>25-50	>50-75	>50-75	>50-75
Interprestasi	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup

\* Nilai Tahun 2021

Sumber : Sekertariat Daerah Bag. Ortala Kab Muna Barat 2022

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kemen PAN/RB Tahun 2022, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada tahun 2022 memperoleh predikat CC yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2021 yaitu CC. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

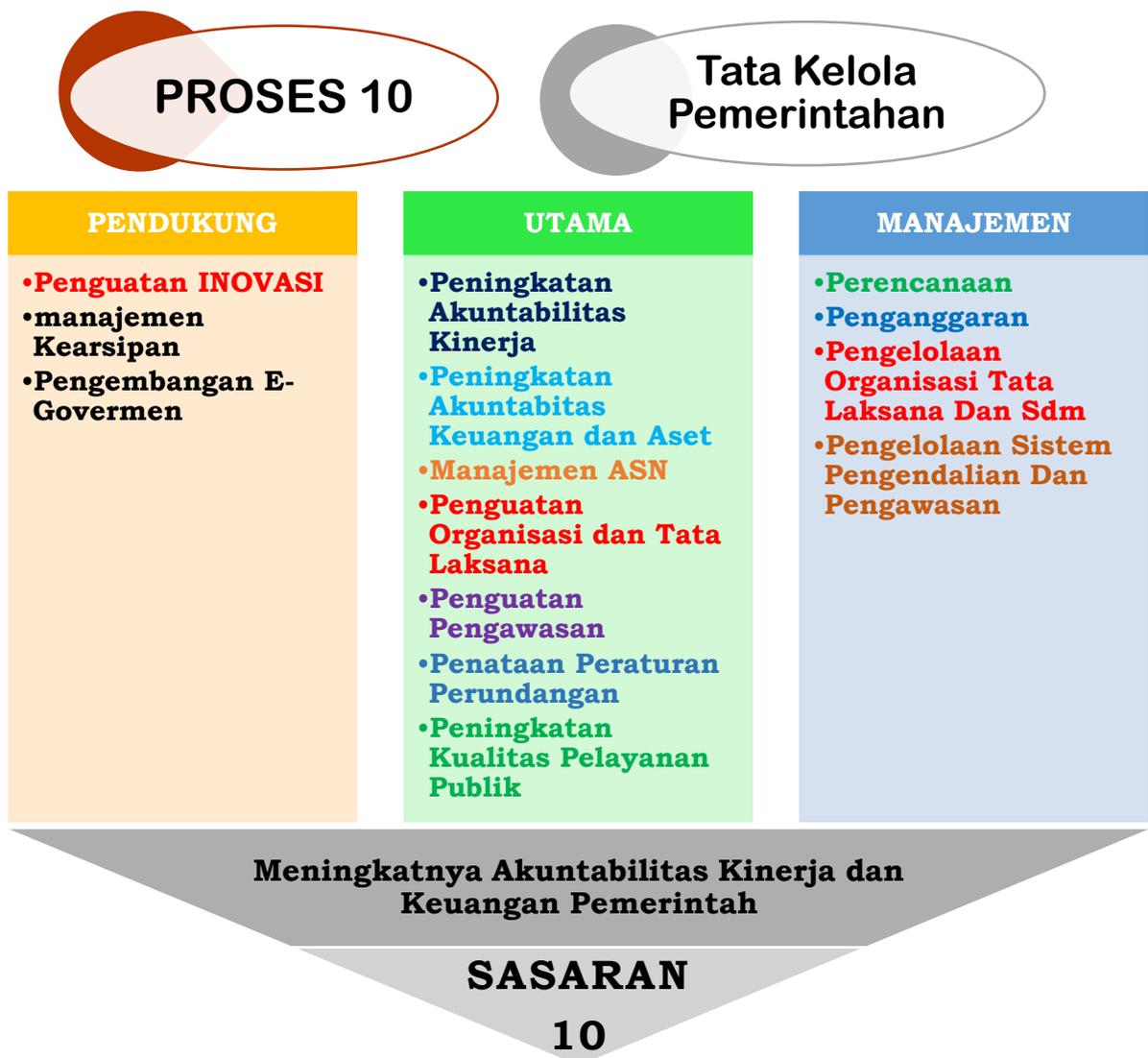
Sedangkan untuk Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 kali berturut-turut sejak tahun 2018. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat sudah berada di level tinggi, namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat

### Framework Kebijakan

Untuk meningkatkan kapasitas tatakelola pemerintahan, disusunlah proses bisnis sebagai upaya untuk mencapai sasaran. Dengan mengacu pada proses ini, berujung pada penyusunan program kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah sesuai ketugasan masing-masing

**Gambar 3.26**

Proses Bisnis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah



Pencapaian sasaran, 3 proses yang dilakukan adalah proses manajemen, utama dan pendukung. Proses manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan organisasi, tatalaksana dan sdm serta pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Proses utama merupakan inti dari pencapaian sasaran, peran besar dari masing masing Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk menjadi kunci peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Sedangkan Proses Pendukung adalah proses yang dibutuhkan keberadaannya untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat pencapaian sasaran. Penguatan Inovasi, Pengembangan E-Gov dan Manajemen Kearsipan menjadi dukungan penting dalam Tatakelola Pemerintah, terlebih dalam perkembangan jaman di masa kini yang membutuhkan kecepatan dan inovasi serta teknologi

### 3.2.11. Sasaran 11 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

#### Pengukuran Capaian Sasaran

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan **masyarakat** yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat **masyarakat** dalam memperoleh **pelayanan** dari aparatur penyelenggara **pelayanan publik** dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

**Tabel 3.15**  
Pengukuran Capaian Sasaran 9

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	88,37	98,19
Rata-rata Capaian Kinerja				98,19
Predikat			Sangat Tinggi	

Sumber : Bappeda Kab Muna Barat 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat di ukur berdasarkan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan public di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2022 capain IKM dengan nilai 88,37

Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari empat tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampai dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat).

**Tabel 3.16**  
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

sNilai/ Unsur	96	99	98	97	103	96	100	101	103	102	98	104	97	100
NRR /Unsur	3,429	3,536	3,500	3,464	3,679	3,429	3,571	3,607	3,679	3,643	3,500	3,714	3,464	3,571
NRR tertbg	0,243	0,251	0,249	0,246	0,261	0,243	0,254	0,256	0,261	0,259	0,249	0,264	0,246	0,254
	UP1	P2	UP3	UP4	UP5	UP6	UP7	UP8	UP9	UP10	UP11	UP12	UP13	UP14

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata (NRR)	NRR x 0,071)
1	Persedur Pelayanan	3,429	0,243
2	Persyaratan Pelayanan	3,536	0,251
3	Kejelasan Petugas pelayanan	3,500	0,249
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,464	0,246
5	Tanggung Jawab Pelayanan	3,679	0,261
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,429	0,243
7	Kecepatan Pelayanan	3,571	0,254
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3,607	0,256

9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,679	0,261
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	3,643	0,259
11	Kepastian Biaya Pelayanan	3,500	0,249
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	3,714	0,264
13	Kenyamanan Lingkungan	3,464	0,246
14	Keamanan Pelayanan	3,571	0,254
<b>Nilai Indeks</b>			<b>3,535</b>
<b>Nilai IKM/Predikat</b>		<b>88,37</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

Sumber : Bagian Pemerintahan dan Bappeda Kab Muna Barat 2022 (diolah)

satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum (*public service*), selain tugas pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Meski demikian, sering kali layanan publik dikeluhkan warga karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Jika kita tengok laman media sosial, akan terbaca begitu ramainya postingan warga yang komplain pelayanan instansi pemerintah mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

Kegiatan penyusunan IKM dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan Pemerintah di wilayah. Tujuannya untuk mendapatkan *feedback* secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.

### **Kendala Utama Kualitas Pelayanan**

Rendahnya kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap implementasi Standar Pelayanan Publik adalah kendala utama kualitas pelayanan di seluruh instansi pemerintah kita. Rendahnya

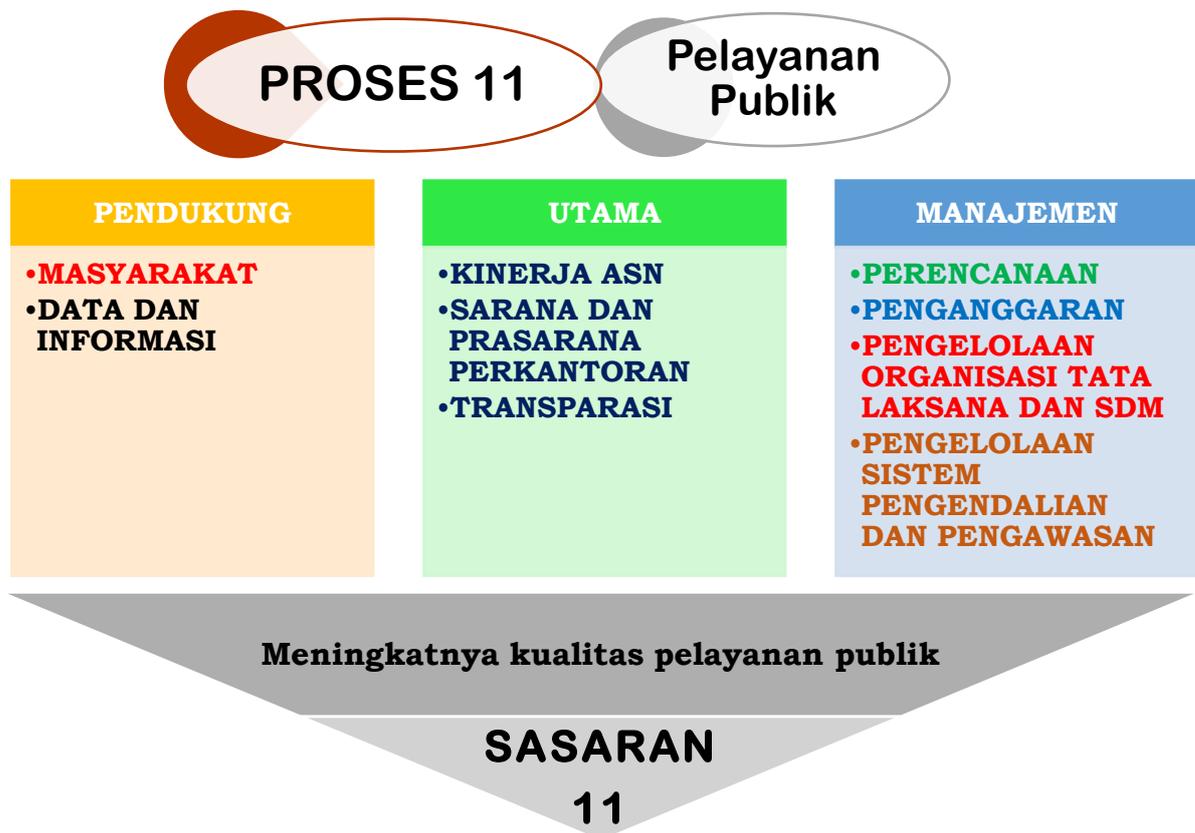
kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparaturnya misalnya ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungutan liar, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan dan secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Hal ini mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi, hambatan pertumbuhan investasi, dan tentu saja berdampak kepada kepercayaan publik terhadap aparaturnya dan pemerintah menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik. Akibatnya terjadi korupsi, inefisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik menjadi rendah. Karena itu dibutuhkan standar pelayanan sebagai instrumen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. (pasal 20-21 undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009).

### **Framework Kebijakan**

Untuk meningkatkan kapasitas tatakelola pemerintahan, disusunlah proses bisnis sebagai upaya untuk mencapai sasaran. Dengan mengacu pada proses ini, berujung pada penyusunan program kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah sesuai ketugasan masing-masing

**Gambar 3.27**  
Proses Bisnis Meningkatnya kualitas pelayanan publik



### 3.2.12. Sasaran 12 Meningkatnya kualitas penerapan standar pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan

#### Pengukuran Capaian Sasaran

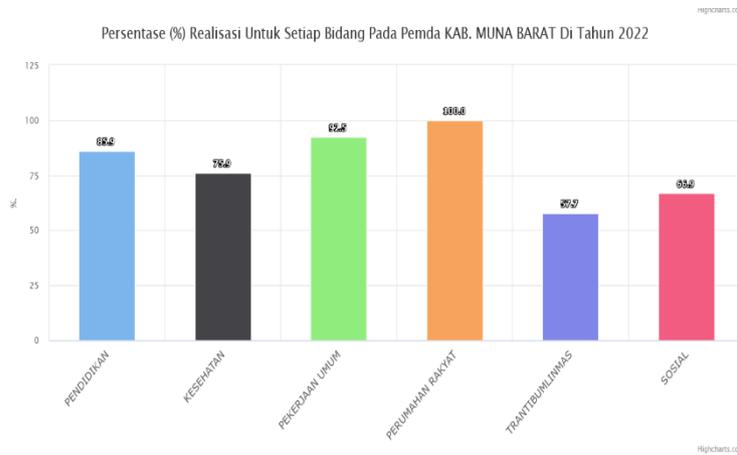
**Standar Pelayanan Minimal (SPM)** merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima. Sasaran 12 Meningkatnya kualitas penerapan standar pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dengan indicator Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 3.28**  
Pengukuran Capaian Sasaran 12

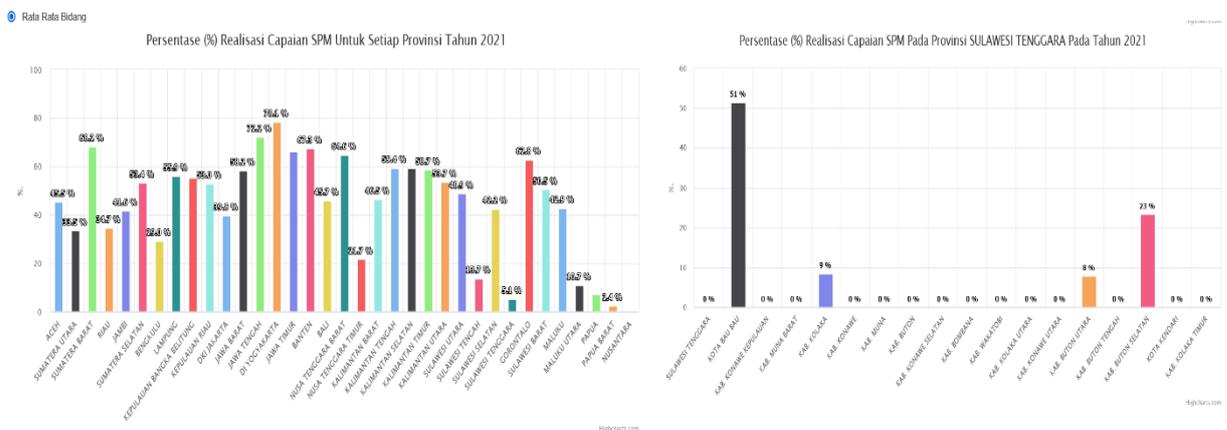
Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata capaian pelayanan dasar	SPM	%	100	80
Rata-rata Capaian Kinerja				80,00
Predikat				Tinggi

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

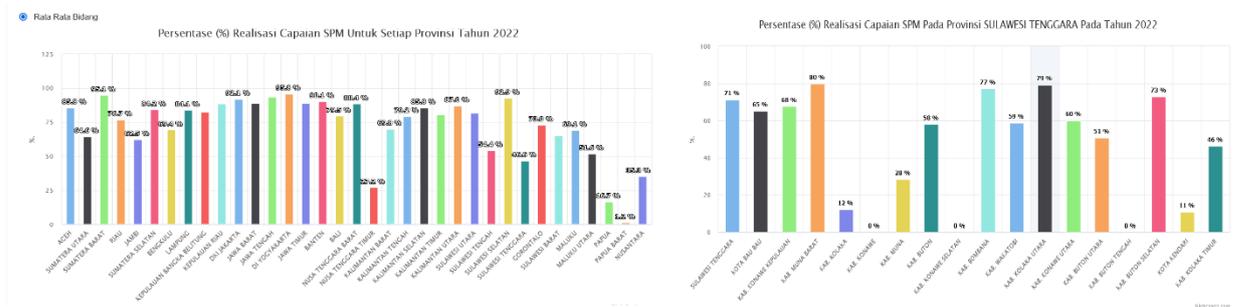
**Gambar 3.29**  
Persentase Capaian SPM Kabupaten Muna Barat Tahun 2022



**Gambar 3.30**  
Persentase Capaian SPM Provinsi dan Perbandingan Kabupaten 2021

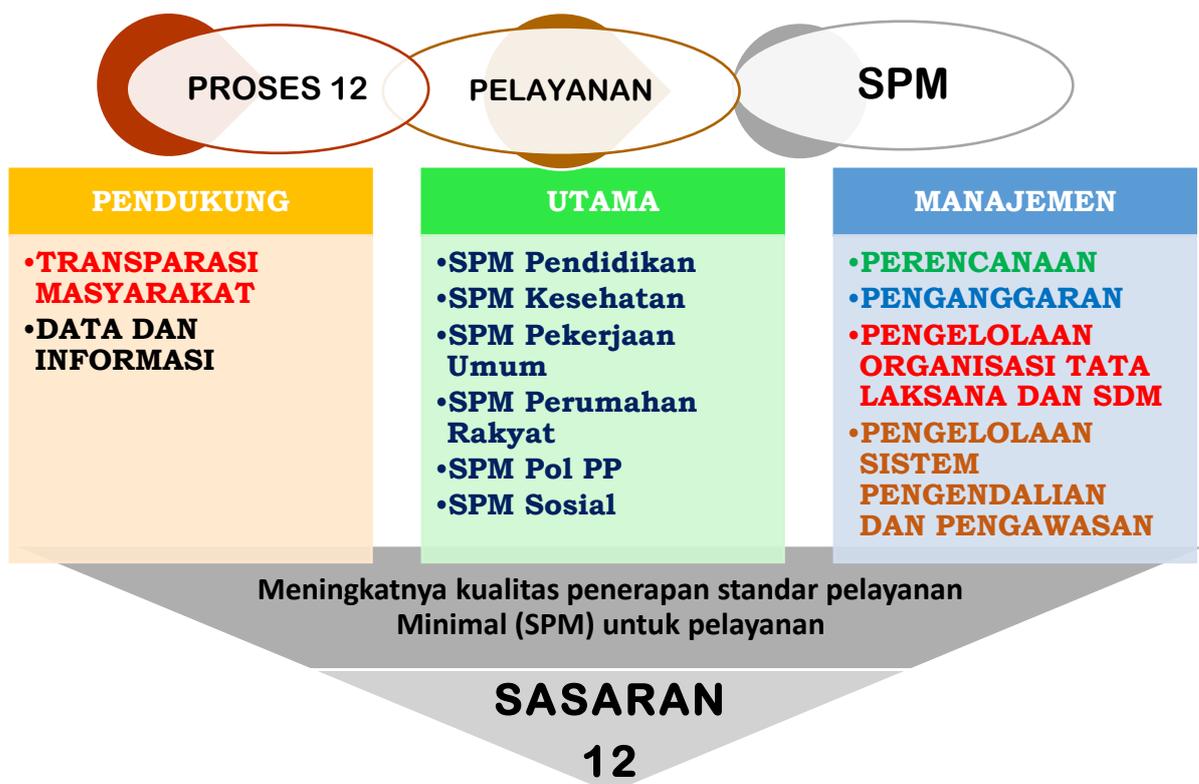


**Gambar 3.31**  
 Persentase Capaian SPM Provinsi dan Perbandingan SPM Kabupaten 2022



Berdasarkan data diatas menunjukkan Persentase capaian SPM pada Provinsi Sulawesi Tenggara Secara Nasional dengan nilai 46,6 % pada Tahun 2022 sedangkan Tahun 2021 dengan nilai 5,1% Untuk Kabupaten Muna Barat di tahun 2021 persentase capaian Realisasi SPM masih 0 % pada tahun 2022 meningkat dengan nilai 80%

**Gambar 3.32**  
 Proses Bisnis Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha



### 3.3. REALISASI BELANJA TAHUN 2022

Akuntabilitas anggaran dimulai sejak proses penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran. Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan proses efisiensi anggaran selama proses penyusunan dokumen perencanaan tahun 2022

Saat proses penyusunan dokumen perencanaan tahun 2022. Efisiensi tersebut diperoleh dari hasil verifikasi atas usulan perangkat daerah oleh Tim Verifikasi dengan mempertimbangkan:

- 1) Realisasi kinerja dan anggaran tahun sebelumnya
- 2) Proses bisnis pencapaian target RPJMD
- 3) Pencapaian indikator SPM dan SDGs,
- 4) Hasil musrenbang dan 5) Pokok Pokok Pikiran DPRD.

Dari tabel tersebut, didapat bahwa Realisasi Rp, 665.777.142.208,50,- **daya serap penggunaan anggaran 94,96%** Realisasi anggaran pendukung sasaran daerah pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 3.29**

Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	URAIAN	TARGET APBD PERUBAHAN PENJABARAN 2021	REALISAI	
			Rp.	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	616.195.483.150,00	674.091.632.937,00	109,40
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.002.726.150,00	22.630.769.907,00	87,03
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	504.026.445.000,00	564.577.113.027,00	112,01
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.908.446.350,00	14.210.409.013,00	102,17
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	701.138.441.189,00	669.593.471.389,50	95,50
5.1	BELANJA OPERASI	425.887.593.487,00	405.629.329.733,50	95,24
5.2	BELANJA MODAL	144.835.771.669,00	135.201.859.906,00	93,35
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.610.661.833,00	15.491.867.550,00	93,26
5.4	BELANJA TRANSFER	113.804.414.200,00	113.270.414.200,00	99,53

	<b>Surplus/(Defisit)</b>	(84.942.958.039,00)	7.599.999.602,50	-8,95
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
	Penerimaan Pembiayaan			
	- SILPA Tahun Sebelumnya	84.942.958.039,00	84.942.958.039,00	100,00
	Pengeluaran Pembiayaan			
	<b>Pembiayaan Netto</b>	84.942.958.039,00	84.942.958.039,00	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,-	92.542.957.641,50	

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (*performance results*) Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2017-2022 dan telah memenuhi 13 (tiga belas) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan. Target yang digunakan sebagai dasar Pengukuran telah mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19.

Dari hasil analisis terhadap 13 sasaran yang mencakup 16 indikator kinerja sasaran, dapat diketahui bahwa keseluruhan dari 6 indikator kinerja sasaran atau 100 % mendapat predikat sangat tinggi. Pencapaian target indicator kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung dalam Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 701.138.441.189,- dengan Realisasi sebesar Rp. 665.777.142.208 atau 95%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD 2017-2022 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Implementasi proses bisnis dalam penyusunan perencanaan anggaran menjadi kunci utama dalam pencapaian target kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat di masa-masa mendatang